



**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGANGKATAN ANAK DAN AKIBAT  
HUKUMNYA DALAM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM  
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

TESIS

Disusun

Untuk memenuhi persyaratan Memperoleh Derajat S2  
Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh :

**Jiiy Ji'ronah Muayyanah**

**B4B008147**

Pembimbing

**Prof. H. Abdullah Kelib, SH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2010**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGANGKATAN ANAK DAN AKIBAT  
HUKUMNYA DALAM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM  
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Disusun Oleh ;

**Jiiy Ji'ronah Muayyanah**  
**B4B 008 147**

Dipertahankan didepan Dewan Penguji  
Pada tanggal 30 Maret 2010

Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan

Pembimbing

Mengetahui,  
Ketua Progam Studi  
Magister Kenotariatan  
Universitas Diponegoro

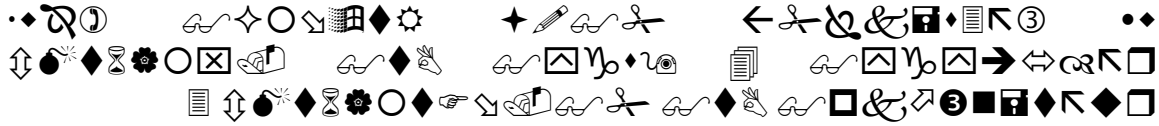
**Prof. H. Abdullah Kelib, S.H**

**NIP. 130354857**

**H. Kashadi, S.H., M.H**

**NIP. 19540624 198203 1 001**

## MOTTO



Artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa):

## Persembahan

Terimakasih kepada Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw

Abah, Umi, Kakak, dan segenap Keluarga.

Atas dukungan Morilnya

Sahabat-sahabatku senasib seperjuangan

Seseorang yang menjadi semangat untuk meraih semua ini.

## ABSTRAK

Tesis ini mengambil judul **Tinjauan Hukum Pengangkatan Anak Serta Akibat Hukumnya Dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam ( KHI )**, mengingat pentingnya kehadiran seorang anak sebagai penerus keturunan dan sebagai pelengkap kebahagiaan dalam rumah tangga, maka bagi mereka yang tidak dikaruniai anak alternatifnya adalah dengan mengangkat anak. Dan untuk mendapatkan kepastian hukumnya maka harus mengajukan permohonan pengangkatan anak Pengadilan Agama.

Permasalahannya adalah kedudukan anak angkat menurut Hukum Islam dan akibat hukumnya dalam pembagian waris dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh Hakim Pengadilan Agama dalam perkara permohonan penetapan anak.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut dilakukan penelitian dengan metode pendekatan secara yuridis normatif terhadap Alqur'an, Hadist dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan anak angkat. Selain itu sebagai pelengkap juga dilakukan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama kabupaten Kendal. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang berlaku dan dalam praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : kedudukan anak angkat adalah sebagai seorang anak yang dalam pemeliharaannya kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal ke orangtua angkat, berdasarkan putusan Pengadilan. Akibat hukumnya, anak angkat tidak bernasab dan tidak sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, tetapi ia mewaris dengan jalan hak wasiat wajibah dengan ketentuan tidak melebihi 1/3 dari harta warisan. Namun pada hakekatnya bagian ini terlalu besar, sehingga dalam kenyataan ada yang memberinya sebesar 1/8 atau 1/10 saja.

Pertimbangan-Pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh hakim Pengadilan Agama berdasarkan *maslahah mursalah* yaitu untuk kesejahteraan anak, pelengkap kebahagiaan orang tua angkat yang tidak mempunyai anak serta untuk membantu orang tua asal yang kurang mampu mengasuh dan memelihara anak kandungnya tersebut. Maslahat ini dapat digunakan karena : a) adanya kesesuaian antara *maslahat* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariah ( *maqosidu al-syariah* ), b) *Maslahat* itu harus masuk akal, c) Dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi. dalam pengertian bahwa apabila *maslahat* diterima oleh akal tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.

Kata Kunci : Pengangkatan Anak, Pembagian Warisan, Kompilasi Hukum Islam

## ABSTRAK

Tesis ini mengambil judul **Tinjauan Hukum Pengangkatan Anak Serta Akibat Hukumnya Dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam ( KHI )**, mengingat pentingnya kehadiran seorang anak sebagai penerus keturunan dan sebagai pelengkap kebahagiaan dalam rumah tangga, maka bagi mereka yang tidak dikaruniai anak alternatifnya adalah dengan mengangkat anak. Dan untuk mendapatkan kepastian hukumnya maka harus mengajukan permohonan pengangkatan anak Pengadilan Agama.

Maka permasalahannya adalah kedudukan anak angkat menurut Hukum Islam dan akibat hukumnya dalam pembagian waris dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh Hakim Pengadilan Agama dalam perkara permohonan penetapan anak.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut dilakukan penelitian secara normatif terhadap Alqur'an, Hadist dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan anak angkat. Selain itu sebagai pelengkap juga dilakukan wawancara dengan Hakim ROCHMAD, SH, M.H, dan Hakim MUHAMMAD KASTHORI, SH,M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama kabupaten Kendal. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif, sedangkan pengambilan keputusan dilakukan dengan logika deduksi.

Berdasarkan analisis dan hasil wawancara diketahui bahwa :  
kedudukan anak angkat adalah sebagai seorang anak yang dalam pemeliharaannya kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal ke orangtua angkat, berdasarkan putusan Pengadilan. Akibat hukumnya, anak angkat tidak bernasab dan tidak sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, tetapi ia mewaris dengan jalan hak wasiat wajibah dengan ketentuan tidak melebihi 1/3 dari harta warisan. Namun pada hakekatnya bagian ini terlalu besar.

Pertimbangan-Pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh hakim Pengadilan Agama adalah berdasarkan masalah mursalah yaitu untuk kesejahteraan anak, pelengkap kebahagiaan orang tua angkat yang tidak mempunyai anak serta untuk membantu orang tua asal yang kurang mampu mengasuh dan memelihara anak kandungnya tersebut. Masalah ini dapat digunakan apabila : a) adanya kesesuaian antara masalah yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariah ( *maqosidu al-syariah* ), b) Masalah itu harus masuk akal, masalah mempunyai sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional jika diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima. c) Dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi. dalam pengertian bahwa apabila masalah diterima oleh akal tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.

Kata Kunci : Pengangkatan Anak

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan sanjungan hanya berhak kita panjatkan kepada Allah Swt, yang telah memberikan rahmad dan hidayahnya kepada hamba sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Tesis ini sebagai bentuk pertanggungjawaban keilmuan dan merupakan satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang serta sebuah “mahakarya” bagi penulis sebagai mahasiswa. Dalam penulisan tesis ini penulis telah berupaya untuk membahas dan menguraikan semua permasalahan yang menjadi pokok penyusunan tesis yang telah sesuai dengan pengetahuan yang ada. Namun demikian harus disadari bahwa tesis ini bukan merupakan akhir segala kreatifitas dan bukan merupakan solusi yang sempurna, karenanya setiap saran dan kritik membangun akan memberikan kontribusi bagi tesis ini.

Ucapan terimakasih terkhusus penulis tujukan kepada bapak Prof. H. Abdullah Kelib, SH, selaku pembimbing yang telah meluangkan dan mencurahkan ilmunya dengan penuh kesabaran, ketelitian serta kearifan hingga tesis ini dapat terselesaikan.

Ucapan terimakasih juga penulis tujukan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini, sehingga dapat terselesaikan. Pada akhirnya penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Susilo Wibowo, M.S.Med, S.p. And, selaku Rektor Universitas Diponegoro, Semarang
2. Bapak Prof. Y. Warella MPA, PhD, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

3. Bapak Kashadi, SH, MH, selaku ketua Progam Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang
4. Bapak Dr. Budi Santoso, SH, Msi, Selaku Sekertaris I Progam MagiterKenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang
5. Bapak Dr. Suteki, SH, M.Hum, selaku Sekertaris II Progam Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang
6. Bapak Prof H.Abdullah Kelib, SH, selaku dosen pembimbing yang telah sangat sabar, bijak dan mencurahkan ilmunya dalam membimbinng saya hingga tesis ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
7. Seluruh dosen dan staff pengajar Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang
8. Terkhusus untuk Abah KH. Syaichun dan Umi Hj. Aunun Sihabulmillah tercinta, yang tidak pernah lelah memberikan cinta, kasih sayang dan membimbing ananda untuk selalu menjadi manusia yang lebih baik.
9. Kakak-kakakku dan keponakanku: Alm. Maljaal Lubab, Tali Tulab, SH, Rofiur Rutab, Mag, Ulil Albab, Sag, Rohna Majal Anjab, Sag, Rotiyal Izzah, Rotiyal Inayah,SH, Rotiyal Hidayah, S.Pdi, Rotiyal Umroh, SH, Iman Fadhilah, Mag, Nafisatul Fikriyah, dan Nila Khoirun Nihlah serta keluarga besarku, Terimakasih atas kasih sayangnya, semangatnya dan bimbingannya selama ini hingga terselesainya tesis ini.
10. Kekasihku Teuku Alex Firmansyah, SE yang tidak pernah lelah memberikan kekuatan, pelajaran hidup, dan bimbingan dalam berbagai hal terutama keagamaan. Dan Sahabat dekatku Erline Sandra k, dan Beny Pamujiarto.jeng dewi, jeng mtunti, astrid, jeng nina, dan jeng Linda. Reky, Budi, Alvin dan teman-teman Notariat

Universitas Diponegoro, Semarang angkatan 2008 kelas Reguler A1, dan A2 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan dibidang hukum Islam serta berguna bagi masyarakat.

Semarang, 12 Maret 2010

( JIIY JI'RONAH  
MUAYYANAH )



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR -----	v
DAFTAR ISI -----	vi
ABSTRAKS -----	vii
ABSTRACT-----	viii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang -----	1
B. Rumusan masalah -----	9
C. Tujuan penelitian -----	9
D. Manfaat penelitian -----	9
E. Kerangka pemikiran -----	10
F. Metode Penelitian -----	18
1. Metode Pendekatan -----	18
2. Spesifikasi Penelitian -----	19
3. Sumber dan Jenis Data -----	20
4. Teknik Pengumpulan Data -----	21

5. Teknik Analisa Data .....	22
------------------------------	----

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak Angkat Menurut Hukum Islam.....	24
B. Sumber hukum pengangkatan anak menurut Hukum Islam.....	27
C. Motivasi Pengangkatan Anak.....	33
D. Biaya Hidup dan Pendidikan Anak Angkat .....	38
E. Hak-Hak dan Kewajiban Anak Angkat .....	43
F. Kedudukan Anak Angkat .....	45
G. Perwalian Anak Angkat .....	49
H. Pengangkatan Anak Pada Zaman Rosulullah .....	51
I. Sebab-Sebab Orang Menerima Warisan .....	54
J. Halangan Orang Menerima Warisan .....	58

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) dan Akibat Hukumnya Dalam Hal Mewaris .....	60
B. Pertimbangan- Pertimbangan Hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Dalam Penetapan permohonan Pengangkatan Anak.....	87

## BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .....	107
B. Saran .....	109

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

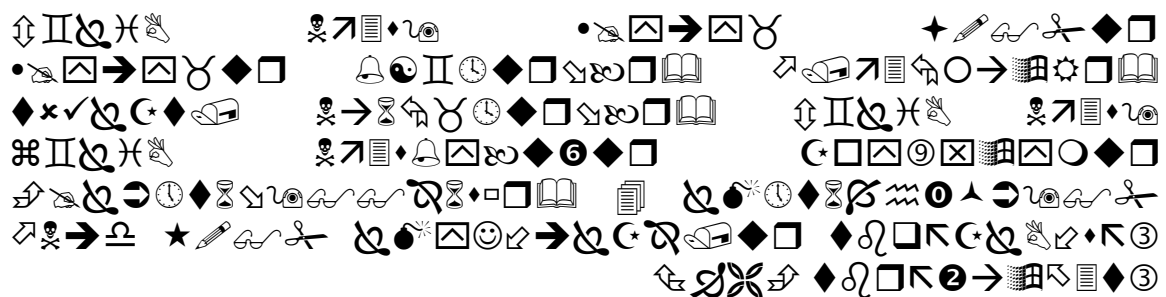
# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 disebutkan bahwa ” Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa dari perkawinan diharapkan akan lahir keturunan (anak) sebagai penerus dalam keluarganya, sehingga orang tua berkewajiban memelihara serta mendidiknya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Kehadiran seorang anak adalah suatu hal yang sangat diidam-idamkan. Kebahagiaan dan keharmonisan suatu keluarga ditandai dengan lahirnya seorang anak, karena salah satu tujuan perkawinan adalah untuk meneruskan keturunan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nahl 72, yaitu :



Artinya : “Allah menjadikan bagimu jodoh ( istri ) dari dirimu ( bangsamu ) dan menjadikan anak-anak dan cucu-cucu dari istrimu itu, serta memberi rizki yang baik, apakah mereka percaya yang batil ( tidak benar ) dan ingkar akan nikmat Allah<sup>1</sup>.

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentuk pada takdir ilahi, dimana keinginan untuk mempunyai anak tidak tercapai. Pada umumnya manusia tidak akan puas dengan apa yang dialaminya, sehingga berbagai upaya dilakukan untuk memenuhi keinginan tersebut. Dalam hal keinginan memiliki anak, usaha yang bisa mereka lakukan adalah dengan mengangkat anak (adopsi).

Pengangkatan anak disini merupakan alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga,karena “Tujuan dari perkawinan yang dilakukan, pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan, yaitu anak. Begitu pentingnya hal keturunan (anak) ini, sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum, karena, misalnya, ketiadaan keturunan (anak). Perceraian, poligami dan pengangkatan anak merupakan beberapa peristiwa hukum yang terjadi karena alasan di dalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan (walaupun bukan satu-satunya alasan). Tingginya frekuensi perceraian, poligami dan pengangkatan anak yang dilakukan didalam masyarakat mungkin merupakan akibat dari perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan, maka tujuan perkawinan itu tidak tercapai.”<sup>2</sup>

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil di dalam masyarakat luas, yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Namun tidak selalu ketiga unsur itu terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak atau keturunan. Keturunan dalam suatu perkawinan dapat berasal dari darah dagingnya sendiri atau anak kandung yang didalam UU No 1 Tahun 1974 disebut sebagai anak sah.

---

<sup>1</sup> Q.S. An-Nahl Ayat 71

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Soleman B. Takeko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta; Rajawali, 1983, hlm. 275.

Definisi dari anak sah ini terdapat pada Pasal 42 undang-undang perkawinan (UU no.1 tahun 1974) yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah. Apabila pasangan suami istri tersebut dalam perkawinannya tidak bisa mempunyai keturunan, maka mereka juga dapat meneruskan keturunan agar suku / clan tidak punah dengan cara mengangkat anak atau sering juga disebut adopsi.

Oleh karena itu, tujuan pengangkatan anak antara lain untuk meneruskan keturunan, manakala di dalam suatu perkawinan tidak dikaruniai anak. Hal ini merupakan salah satu jalan keluar dan alternatif positif serta manusiawi terhadap kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga. Akan tetapi perkembangan masyarakat sekarang menunjukkan bahwa tujuan pengangkatan anak tidak semata-mata atas motivasi untuk meneruskan keturunan saja, tetapi juga karena faktor politik, sosial budaya dan sebagainya<sup>3</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diatur tentang masalah adopsi atau lembaga pengangkatan anak. Tetapi dalam hukum adat lembaga pengangkatan anak sudah dikenal sejak lama. Mengenai pengangkatan anak menurut hukum adat Indonesia, lebih banyak didasarkan pada pertalian darah dan tata cara menurut hukum adat dan kebiasaan masyarakat setempat. Misalnya di Jawa, orang lebih suka mengangkat anak dari kalangan keluarga sendiri. Pengangkatan anak menurut hukum adat supaya dianggap sah harus dilaksanakan dengan upacara-upacara tertentu dan dengan dihadiri kepala desa setempat serta disaksikan khalayak ramai, agar menjadi jelas dan statusnya menjadi terang bagi anggota keluarga. Hal ini sebagaimana disebut dalam Yurisprudensi

---

<sup>3</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistim Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika, Cet: 11, 1992, hlm. 7-8.

Mahkamah Agung Tanggal 19 November 1975 No.696/K/SIUP / 1975 yang menetapkan : "Bila belum diperas dan disiar, belum memenuhi syarat sebagai anak angkat yang sah."

Dalam perkembangan selanjutnya, orang tidak membatasi dari anak kalangan keluarga sendiri saja, tetapi juga pada anak-anak yang lain yang terdapat pada panti-panti asuhan, penampungan bayi dan sebagainya. Meskipun adopsi belum diatur secara tegas dalam perundang-undangan yang bersifat nasional, dalam prakteknya adopsi itu sering terjadi di masyarakat. Oleh sebab itu harus diusahakan adanya suatu peraturan yang mengatur dan menjamin pelaksanaan adopsi. Walaupun pada dasarnya pengangkatan anak merupakan masalah keluarga, namun akhirnya menjelma menjadi problema masyarakat dan negara, sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan tertentu, misalnya kasus penculikan anak dan jual beli anak, seperti diatur dalam KUHP Pasal 328 yang mengatur masalah penculikan dan diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Masalah lain adalah mengenai perdagangan anak. Meski sampai saat ini belum diketahui jumlahnya secara pasti, berbagai peristiwa dengan berbagai modus telah membuat anak menjadi korban perdagangan anak. Anak-anak umumnya diperdagangkan untuk kepentingan prostitusi, pengemis, pembantu rumah tangga dan narkoba. Dan tidak sedikit anak-anak itu mendapatkan perlakuan yang kasar oleh para pelakunya.

Menurut Imam Sudiat pengangkatan anak menurut hukum adat adalah suatu perbuatan memungut seorang anak dari luar kedalam kerabat, sehingga terjadi suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewenangan biologis. Anak itu dilepaskan dari lingkungannya semula dan dipungut masuk ke dalam kerabat yang mengadopsinya,

dengan suatu pembayaran berupa benda-benda magis. Jadi adopsi itu merupakan perbuatan tunai.<sup>4</sup>

Secara umum pengangkatan anak menurut hukum adalah pengalihan anak terhadap orang tua angkat dari orang tua kandung secara keseluruhan dan dilakukan menurut adat setempat agar sah. Jadi orang tua kandung sudah lepas tangan terhadap anak itu, dan tanggung jawab beralih kepada orang yang mengangkatnya.

Menurut hukum Islam pada prinsipnya mengakui dan membenarkan pengangkatan anak dengan ketentuan tidak boleh membawa perubahan hukum dibidang nasab, wali mewali dan aris mewaris. Dasar hukumnya adalah Al Qur'an sebagaimana tertera dalam Surat Al Ahzab ayat ( 4 dan 5 ) :



Artinya : Allah tidak menjadikan bagi seorang dua buah hati dalam rongganya: Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu *zihar* sebagai ibumu. dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu ( sendiri ). Yang demikian itu adalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang ( benar ). Pangillah mereka(

<sup>4</sup> Imam Sudiat, *Hukum Adat Sketsa Adat*, Yogyakarta; Liberty, 1981, hlm 102

anak-anak angkatmu itu) dengan ( memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pad sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka ( panggillah mereka sebagai ) saudara-saudaramu seagama dan maulamu. Dan tidak ada atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetap ( yang ada dosanya ) apa yang disengaja oleh hatimu dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang.<sup>5</sup>

Dari ayat Al-Ahzab tersebut dapat diketahui garis hukumnya, yaitu :

1. Allah tidak menjadikan dua buah hati dalam dada manusia. Allah tidak akan menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri.
2. Anak angkat bukanlah anak kandungmu.
3. Panggilah anak angkatmu menurut nama bapaknya
4. Bekas istri anak angkat boleh kawin dengan anak angkat

Namun pada kenyataannya sejak zaman dahulu kala ( Zaman Jahilliah ) orang Arab mengenal dan telah melakukan pengangkatan anak. Nabi Muhammad SAW pada waktu itu pernah mengangkat seorang anak laki-laki bernama Zaid bin Haritsah. Surat Al Ahzab Ayat ( 4 dan 5 ), sesungguhnya diturunkan untuk memberikan aturan kepada umat Islam dalam mengangkat anak dengan disesuaikan dengan adat dan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan bangsa Arab pada waktu itu.

Menurut Soedaryo Soimin penamaan anak angkat tidak menjadikan seorang mempunyai hubungan yang terdapat dalam darah. Penamaan dan penyebutan anak angkat tidak diakui didalam Hukum Islam untuk dijadikan dasar dan sebab mewaris, karena prinsip dasar mewaris dan prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau urhaam. Hubungan anak angkat dengan orang yang mengangkatnya bukanlah hubungan anak sulbi. Anak sulbi asalnya anak sulbu artinya: anak kandung yang berasal dari sumsum tulang sulbi atau tulang punggung kamu.<sup>6</sup>

Dalam perkembangannya, hukum Islam memperbolehkan pengangkatan anak asal tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya, sehingga prinsip

---

<sup>5</sup> Q.S,Al-Ahzab Ayat 4-5

<sup>6</sup> Soedaryo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Jakarta; Sinar Gratika, 1992, hlm. 42.



pengangkatan anak dalam hukum Islam hanya bersifat pengasuhan, pemberian kasih sayang dan pemberian pendidikan.

M. Budiarto menyebutkan menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya dan keluarganya.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkatnya, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkatnya tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai alamat atau tanda pengenal. diatas,
4. Orang tua angkatnya tidak bisa bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya<sup>7</sup>

Meskipun dalam alqur'an tidak memberi hak bagi anak angkat untuk menerima warisan dari orang tua angkatnya, namun dalam Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) yang merupakan produk manusia dari berbagai madzhab dan dijadikan salah satu sumber hukum dinegara kita memberikan ketentuan bahwa anak angkat berhak menerima bagian warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Ayat ( 1 ) dan Ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam ( KHI ), sebagai berikut :

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  ( sepertiga ) dari harta warisan anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  ( sepertiga ) dari harta warisan orangtua angkatnya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Jakarta; Akademika Presindo, 1985, hlm. 24,25

<sup>8</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademi Presindo, 1995, hlm. 164

Berdasarkan isi bunyi Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) Ayat ( 1 ) dan ( 2 ) diatas dapat dipahami bahwa wasiat wajibah yang dimaksud oleh Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat atau sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atau anak angkatnya, dengan jumlah maksimal  $\frac{1}{3}$  ( sepertiga ) dari harta peninggalan

Secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari adapt kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah merambah dalam praktik melalui lembaga Peradilan Agama, di beberapa daerah seperti kabupaten Bantul, Sulawesi, Yogyakarta, Semarang, Ungaran, dan kabupaten Kendal telah banyak dilakukan, dan pengadilan agama telah memberikan penetapan yang sekaligus dipandang sebagai yurisprudensi tetap tentang pengangkatan anak dikalangan hakim Peradilan Agama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **'Tinjauan Kedudukan Hukum Pengangkatan Anak Serta Akibat Hukumnya Terhadap Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam '**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kedudukan hukum anak angkat serta akibat hukumnya dalam pembagian warisan menurut hukum Islam dan kompilasi hukum Islam?
2. Pertimbangan hukum apakah yang dipergunakan oleh hakim Pengadilan Agama dalam perkara penetapan permohonan pengangkatan anak ?

### **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan hukum anak angkat serta akibat hukumnya dalam pembagian warisan dalam hukum Islam dan kompilasi hukum Islam.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh hakim Pengadilan Agama dalam perkara penetapan permohonan pengangkatan anak.

### **D. Manfaat penelitian**

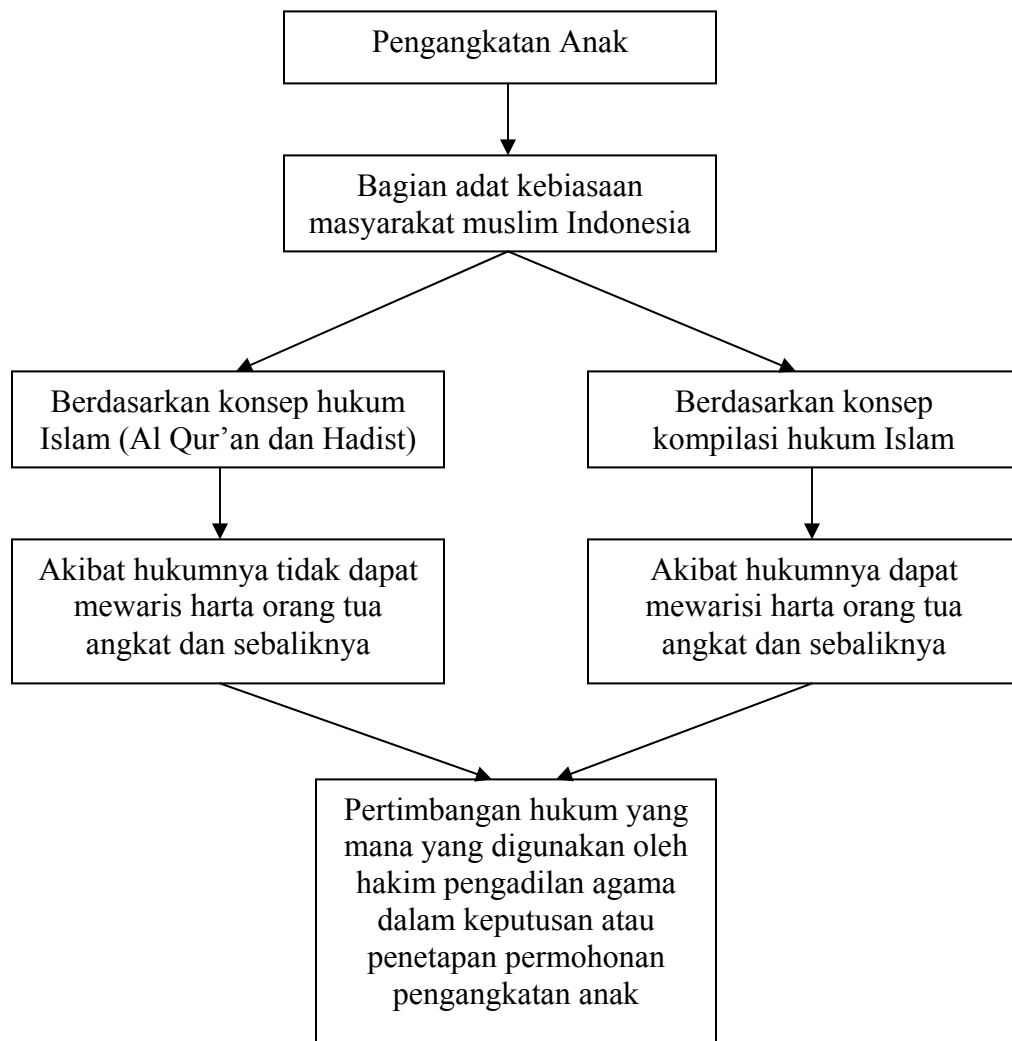
1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan mengenai hukum waris Islam. Dan untuk mencoba berusaha menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan oleh penulis dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat

2. Secara praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan gambaran-gambaran pada pihak yang terkait, khususnya pada orang tua angkat mengenai hak dan kewajiban mereka, terutama menyangkut harta warisan
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis pada khususnya dan masyarakat umum pada umumnya
- c. Penelitian ini di harapkan dapat memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai tatacara pengangkatan anak dan akibat hukumnya.

### **E. Kerangka Pemikiran**



## 1. Pengertian anak angkat

Dalam pembahasan tesis ini yang menjadi kajian adalah anak angkat. Oleh karena itu, terlebih dahulu penyusun mengemukakan pengertian anak angkat.

Dan dalam bahasa Arab disebut *tabanni* (Tabanna), Yakni menjadikan seseorang sebagai anak kandungnya sendiri. Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Anak

angkat adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri<sup>9</sup>

Menurut Ahmad azhar Basyir dalam bukunya Adopsi dan status hukum Anak, adopsi mempunyai dua pengertian, yaitu :

- 1) Mengambil anak orang lain untuk diasuh, dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri, tanpa memberi status anak kandung kepadanya.
- 2) Mengambil anak orang lain untuk diberi status sebagai anak kandung, sehingga berhak memakai anak nasab orang tua angkatnya dan mewarisi harta peninggalannya dan hak-hak lainnya sebagai hubungan anak dan orang tuanya.<sup>10</sup>

Menurut Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

## **2. Pengangkatan anak dalam hukum Islam**

Hukum Islam tidak membolehkan pemeluknya untuk melakukan pengangkatan anak yang dinasabkan kepada dirinya, tetapi hukum Islam memperhatikan nasib anak terlantar, baik karena ditinggal mati orang tuanya (yatim) maupun karena keadaan ekonomi keluarga. Dalam keadaan demikian, Islam memerintahkan umatnya untuk menyantuni mereka dengan jalan memelihara dan mendidiknya sehingga anak tersebut kelak menjadi anak yang berguna bagi agama, bangsa dan negaranya. Pemeliharaan tersebut bukan seperti pada anak angkat tetapi pemeliharaan itu didasarkan pada perikemanusiaan, cinta kasih dan kasih sayang, tanpa menetapkan hak-hak kepada yang menyebabkan ia muhrim dengan orang yang memeliharanya dan anak-anak kandungnya

---

<sup>9</sup> Tim Penyusun Kamus-Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan XI, Balai Pustaka, 1994, hlm 36

<sup>10</sup> A.Azhar Basyir, *Adopsi dan Status Hukumnya*, [www. google. com](http://www.google.com), tanggal 8 januari 2010

Dengan demikian jelas bahwa hukum Islam melarang terhadap perbuatan hukum pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat tersebut sebagai anak kandung.

Dalam hukum kewarisan Islam, anak angkat tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya. Pada dasarnya hukum Islam telah menetapkan adanya ahli waris yang jika memenuhi syarat dan tidak terhalang ia tetap berhak mewarisi harta peninggalan orang tua yang meninggal (pewaris). Diantaranya adalah anak, baik anak laki-laki maupun perempuan. Anak disini adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, bukan anak yang lahir dari luar nikah (zina).

<sup>12</sup> Yusuf Qardawi, Ahli Bahasa Huamal Hamidi, *Halal Haram dalam Islam*, Jilid I dan II Surabaya, Bina Ilmu, 1982, hlm. 303



Artinya : “Diharamkan atas kamu ( mengawini ) ibu-ibumu, anak-anakmu, saudara-saudaramu perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu ( mertua ), anak-anak istri yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri tetapi jika kamu belum campuri dengan istrimu itu ( dan sudah kamu cerai ) maka tidak berdosa kamu mengawininya. ( Dan diharamkan bagimu ) istri-istri anak kandungmu ( menantu ), dan menghimpun ( dalam perkawinan ) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau: Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang”.<sup>13</sup>

Dari keterangan diatas kiranya jelas bahwa hukum merupakan konkritisasi nilai dari sistem nilai-nilai yang berlaku di masyarakat yaitu suatu keadaan yang dicita-citakan dalam kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai tersebut.<sup>14</sup>

Pengangkatan anak tersebut termasuk perbuatan hukum yang menyangkut gejala sosial dan unsur hukum. Ini berarti suatu kenyataan hukum yang hidup di masyarakat memerlukan ketentuan sendiri untuk mengaturnya, hukum Islam yang bersifat universal mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, baik yang berupa ibadah *mahdah*

<sup>13</sup> Q.S An-Nisa’ Ayat 23

<sup>14</sup> *Ibid*; hlm. 37

maupun *ghoiru mahdah*, diantaranya mengenai pengangkatan anak yang dilarang, namun pengangkatan dapat dibenarkan oleh hukum Islam, Jika perbuatan tersebut akan membawa kemaslahatan bagi anak angkat disatu pihak dan orang tua angkat di pihak lain.

Hal ini sesuai dengan tujuan hukum Islam, yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindarkan *kemudharatan*. *Maslahat* dapat dijadikan sumber penetapan hukum apabila :

1. Adanya kesesuaian antara *maslahat* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariah (maqosidu al-syariah)
2. Maslahat itu harus masuk akal, artinya bahwa *maslahat* mempunyai sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional jika diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
3. Penggunaan dalil *maslahat* ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi, dalam pengertian bahwa apabila *maslahat* diterima oleh akal tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al hajj Ayat 76 :

Artinya Dia sekali-kali tidak menjadi untuk kamu dalam agama saat kesempitan<sup>15</sup>

Dan Hadist nabi SAW :

لا ضرر ولا ضرر

Artinya : Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan<sup>16</sup>

Dalam hukum Islam ada perintah untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Anak angkat, dalam kaitannya dengan harta warisan orang tua angkatnya, secara hukum tidak berhak menerima bagian. Dalam keadaan demikian syariat Islam membuka pintu wasiat bagi orang tua angkat untuk memberikan hartanya sebagian guna kelanjutan pemeliharaan hidupnya. Bahkan menurut Imam Abudawud dan para ulama' salaf bahwa

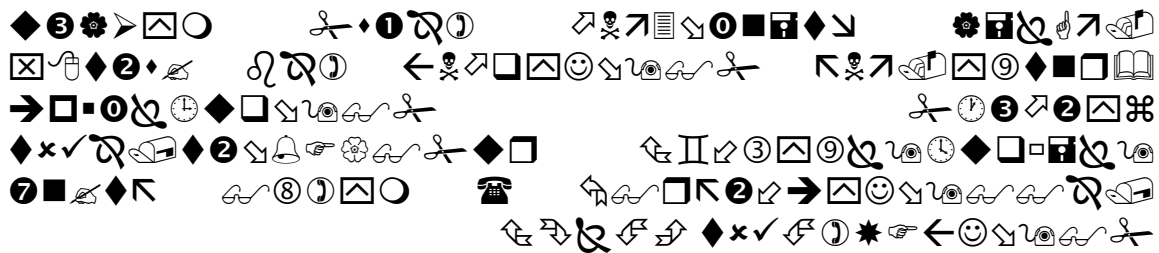
---

<sup>15</sup> QS. Al Hajj ayat 76

<sup>16</sup> Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih ( cetakan ke II )*, Bandung, Kencana Prenada Media Group, hal 200



wasiat hukumnya wajib. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 180, yaitu:



Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila orang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak hendaklah berwasiat kepada ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf. Ini adalah kewajiban bagi orang yang taqwa”<sup>17</sup>

Secara terminologi wasiat adalah:

هبة الانسان غيره عينا او دينا او منفعة على ان يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصى

Artinya : “Pemberian seseorang kepada orang lain, berupa benda, utang, atau manfaat, agar si penerima memiliki pemberian itu setelah si pewasiat meninggal dunia “<sup>18</sup>

Sementara menurut Abd Al-Rahim dalam bukunya *al mubadarat fi al miras al-muqaran*, mendefinisikan wasiat adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda maupun manfaat secara sukarela atau tidak mengharapkan imbalan (*tabarru*) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat.<sup>19</sup>

Dari definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa wasiat adalah sebagai tindakan sukarela si pewasiat memberikan benda atau hak kepada orang lain tanpa

<sup>17</sup> Q.S. Al-Baqoroh (2) :180

<sup>18</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 183

<sup>19</sup> *Ibid*; hal 184-185

mengharapkan imbalan (*tabarru*) yang pelaksanaannya setelah pewasiat meninggal dunia).

Mustafa Salabi dalam bukunya *Ahkam al-wasaya wa al auqaf* mengatakan sebagai berikut:

Kehadiran sistem wasiat dalam hukum Islam sangat penting artinya sebagai penangkal kericuhan dalam keluarga. Karena ada diantara anggota keluarga yang tidak berhak menerima harta peninggalan dengan jalan warisan. Padahal ia telah cukup berjasa dalam pengadaan barang itu, atau seorang cucu miskin terhalang oleh pamannya yang kaya, atau karena berbeda agama dan sebagainya, maka dengan adanya system wasiat yang diatur dalam hukum Islam, kekecewaan dapat diatasi.<sup>20</sup>

Ini berbeda dengan wasiat wajibah sebagai suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau lembaga yang mempunyai hak agar harta seseorang yang telah meninggal dunia, tetapi tidak melakukan wasiat secara suka rela, agar diambil hak atau benda peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula.

Tindakan pembebanan atau pemaksaan ini menurut Fatchur Rahmad dapat dibenarkan. Alasannya karena yang bersangkutan tidak memperhatikan anjuran syari'at.

Dikatakan wasiat wajibah karena dua hal, yaitu:

1. Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui perundang-undangan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat.
2. Ada kemiripan dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.<sup>21</sup>

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir Nomor : 71 Tahun 1946, sebagaimana dikutip Fatchur Rahman menetapkan wajibnya pelaksanaan wasiat wajibah tanpa tergantung persetujuan ahli waris, kendatipun si mati tidak mewasiatkannya.

---

<sup>20</sup> Mustafa Syalabi, *Ahkam al wasaya wa al-auqaf*, hlm 13-14

<sup>21</sup> Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung, Al-Ma'arif, 1981, hlm. 63

Bahkan pelaksanaannya lebih didahulukan sebelum wasiat-wasiat yang lain ditunaikan sudah barang tentu dilakukan setelah kebutuhan jenazah dipenuhi dan pelunasan hutangnya si mati dibayarkan.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 menentukan wasiat wajibah sebagai berikut :

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orangtua angkatnya.

## **F. Metode Penelitian**

Metode adalah suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena suatu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, konsisten dengan mengadakan analisa dan konstruksi.<sup>22</sup>

Penelitian adalah sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diperoleh.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji , *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, cetakan III, Jakarta, Rajawali Press, 1990, hal 1

<sup>23</sup> Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta, BPFE, hal 1

Metode penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran ilmu pengetahuan, usaha mana digunakan untuk menggunakan metode ilmiah.<sup>24</sup>

Dalam usaha mencari kebenaran, salah satunya adalah melalui kegiatan ilmiah seperti penelitian dimana dalam penelitian tersebut akan mencari data atau bahan-bahan yang dapat digunakan untuk penulisan ilmiah.

### **1. Metode pendekatan**

Menurut Rony Hanitjo Soemitro penelitian hukum dapat dibedakan menjadi :

- a. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder.
- b. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer.<sup>25</sup>

Metode pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif yaitu usaha penemuan hukum ( *in concreto* ) yang sesuai untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu masalah hukum tertentu. Dalam usaha tersebut digunakan data seperti perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana terkemuka.<sup>26</sup>

Sehubungan dengan metode penelitian yang digunakan tersebut penulis melakukan dengan cara peneliti peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

---

<sup>24</sup> Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980  
hal 7

<sup>25</sup> Rony Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998,  
hal 10

<sup>26</sup> *Ibid*, hal 9

Berdasarkan uraian-uraian, latar belakang dan permasalahan yang ada, maka dalam tesis ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat *deskriptif analisis* yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang berlaku dan dalam praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan diatas.<sup>27</sup>

*Deskriptif* ini bertujuan untuk mengukur secara cermat terhadap fenomena sosial tertentu serta memberikan gambaran mengenai gejala yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas sedangkan penelitian yang bersifat analitis bertujuan menganalisis masalah yang timbul dalam penelitian.<sup>28</sup>

### 3. Sumber dan Jenis Data

Sesuai dengan fokus utama penelitian yaitu *yuridis normatif*, maka data-data yang hendak dikumpulkan adalah data-data sekunder dari hukum positif, yang meliputi bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>29</sup>

Sumber data dalam penelitian yuridis normatif diperoleh dari :<sup>30</sup>

- a. Bahan hukum primer merupakan penjelasan mengenai buku-buku penunjang, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh Pemerintah,<sup>31</sup> yakni :

- 1). Al-Qur'an

- 2). Hadits-hadits

---

<sup>27</sup> Sukardi, *Metode penelitian pendidikan, kompetensi, dan praktiknya*, Jakarta, Bumi Aksara, 2004, hal 33

<sup>28</sup> Masri Singrimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LPJES, 1995, hal 10

<sup>29</sup> Rony Hanitjo Soemitro, *Op.Cit*, hal 125

<sup>30</sup> Soejono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Pres, 1986, hal 52

<sup>31</sup> Burhan Asthofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka cipta, 2000, hal 103

- 3). Kompilasi Hukum Islam
  - 4). Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - 5). Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan tentang pengangkatan anak
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti didapat dalam buku-buku penunjang, hasil-hasil penelitian hukum, hasil-hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya.<sup>32</sup>
- c. Bahan hukum tersier yaitu kamus-kamus yang membantu menerjemahkan berbagai istilah hukum yang dipergunakan dalam pembahasan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan data-data sebagaimana tersebut diatas dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Data Primer merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan data dari obyek yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan cara :
- Studi kepustakaan

Tujuan dari studi kepustakaan pada dasarnya merupakan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Studi ini dilaksanakan terlebih dahulu agar data yang dapat dijadikan dasar pedoman melakukan wawancara terhadap responden.<sup>33</sup> Studi kepustakaan dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

---

<sup>32</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Op.Cit* , hal 53.

<sup>33</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit*, hal 55

Studi kepustakaan ini dilakukan guna mencari konsepsi, teori-teori, pendapat ataupun penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yaitu Tinjauan hukum terhadap pengangkatan serta akibat hukumnya dalam pembagian waris menurut hukum Islam dan kompilasi hukum Islam, termasuk media internet yang merupakan salah satu sumber informasi yang dapat digunakan oleh peneliti sebagai bahan studi keputusan.<sup>34</sup> Karena internet merupakan sumber informasi yang sangat lengkap dan kompleks.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder ini merupakan data penunjang untuk data primer dan pengumpulan data sekunder ini penulis lakukan dengan cara wawancara. Dengan cara ini penulis melakukan komunikasi langsung untuk memperoleh keterangan yang diperlukan yang sesuai dengan penulisan. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada pihak yang diwawancarai, sehingga proses interaksi dan komunikasi tercapai.<sup>35</sup> Wawancara ini dilakukan secara bebas terpimpin dimana penulis hanya membacakan pertanyaan yang telah disusun secara terperinci dan jelas dalam suatu daftar pertanyaan dan pokok pembicaraan yang terjadi dalam wawancara tidak boleh menyimpang dari apa yang digariskan oleh penulis.<sup>36</sup>

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal –hal yang tidak dapat diperoleh dari studi kepustakaan atau pengamatan. Selain itu dalam penerapannya

---

<sup>34</sup> Ady Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hal 117

<sup>35</sup> Rony Hanitjo Soemitro, *Op.cit*, hal 61

<sup>36</sup> Burhan Asthofa, *Op.Cit*, hal 59

wawancara mendalam secara structural memerlukan suatu keterampilan dan keahlian tertentu dari pokok pewawancara ( penulis ).<sup>37</sup>

## **5. Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan cara menelaah data-data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang didukung dari hasil wawancara terhadap sumber. Dari hasil analisis ini kemudian ditarik kesimpulan yang pada dasarnya merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.<sup>38</sup>

Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diolah secara sistematis, dalam bentuk keterangan-keterangan yang kemudian dianalisa secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian sebagai langkah dalam menjawab pertanyaan yang ada, selanjutnya disusunlah secara sistematis dalam bentuk tesis.

---

<sup>37</sup> Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003, hal 45

<sup>38</sup> Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003, hal 45



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Anak Angkat Menurut Hukum Islam

Untuk menjelaskan pengertian anak angkat, penulis akan membedakannya dari dua sudut pandang yaitu pengertian secara bahasa (etimologi) dan secara istilah (terminologi).

##### 1. Pengertian secara Etimologi

Dalam kamus Bahasa Indonesia dapat dijumpai arti anak angkat, yaitu anak orang lain yang diambil dan disahkan sebagai anaknya sendiri.<sup>39</sup>

Selanjutnya dalam bahasa Belanda dapat dijumpai kata *adopt* yang berarti pengangkatan anak seseorang untuk dijadikan sebagai anak kandungnya sendiri.<sup>40</sup>

Dalam bahasa Inggris dapat dijumpai kata *adopt* yang berarti “*take a child into one’s family and treat it as one’s own*”<sup>41</sup>. Yang dimaksud adalah mengambil anak dalam keluarga dan menganggapnya sebagai anak sendiri.

Sedang dalam bahasa Arab disebut ‘*tabbani*’, yang berarti mengambil anak angkat.<sup>42</sup>

Dari pengertian menurut bahasa, dapat diambil kesimpulan bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat menjadi anak sendiri. Jadi penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatannya sebagai anak kandung.

---

<sup>39</sup> .Purwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976, hal.38

<sup>40</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Belanda, Indonesia-Inggris*, Semarang, Aneka, hal.37

<sup>41</sup> AS.Hornby, EV Gatenbing, *The advancedn Learner’s of Carent English*, London, Oxpord, University press,edisi 2, 1963, hal. 14

<sup>42</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah atau penafsiran Alqur’an, 1973, hal.73

## 2. Pengertian Menurut istilah (Terminologi)

Untuk memberikan pengertian anak angkat menurut istilah, disini dapat dikemukakan beberapa rumusan tentang definisi anak angkat dari para ahli, antara lain:

Menurut Wahbah Al-Zuhaidi sebagaimana dikutip Andi syamsu dan M.Fauzan dalam buku Hukum Pengangkatan Anak dalam perspektif Islam, “*Tabanni*” adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasab-nya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya.<sup>43</sup> Dalam pengertian lain *Tabanni* adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya.<sup>44</sup> Pengertian anak seperti demikian jelas bertentangan dengan hukum islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasab-nya harus dibatalkan

Selanjutnya pembaharuan Hukum Islam Indonesia, dalam Buku II tentang kewarisan Bab I Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.<sup>45</sup>

Menurut ulama fikih Mahmud Saltut, beliau membedakan dua macam anak angkat, yaitu :

- (1) Pernyataan seseorang terhadap anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain kedalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan,

---

<sup>43</sup> Wahbah al-Zuhaidi , *al fiqih al-islami wa al- adilathu*, Juz 9, Bairut, Dar al Fikr al- Ma’ashir, hal 271

<sup>44</sup> Muhammad Muhyi al-Din Abdul Hamid, *Al- Ahwal al- syahsiyah fi al-syariah al-islamiyah*, Mesir, Maktabah Muhammad Ali Shobih, 1966, hal 386

<sup>45</sup> *Himpunan Perundang-undangan dalam lingkungan pengadilan Agama*, Dirbinbapera depag, 2001, hal 360

- pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri.
- (2) Pengertian yang dipahamkan dari perkataan “Tabanni” (mengangkat anak secara mutlak) menurut hukum adat dan tradisi yang berlaku pada manusia, yaitu memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain kedalam keluarganya yang tidak ada hubungan pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak yang sah kemudian ia mempunyai hak dan kewajiban sebagai anak<sup>46</sup>.

Dari definisi yang dikemukakan diatas barang kali menghantarkan penulis untuk lebih memahami istilah anak angkat (adopsi). Istilah anak angkat menurut pengertian pertama dari Mahmud Saltut adalah lebih tepat untuk Indonesia yang mayoritas beragama islam. Sebab disini tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan dalam segala kebutuhan, bukan diperlakukan seperti anak nasabnya sendiri.

Oleh karena itu anak angkat bukan sebagai anak pribadi menurut syari’at islam dan tidak ada ketetapan sedikitpun menurut syariat Islam kalau mengambil standar hukum Islam untuk membenarkannya. Sedangkan pengertian kedua menurut Mahmud Saltut tersebut sama persis menurut hukum barat yang arahnya lebih menekankan kepada memasukkkan anak yang diketahui sebagai anak orang lain kedalam keluarganya dengan mendapat status dan fungsi yang sama dengan anak kandung. Pengertian kedua ini mempunyai konsekuensi sampai kepada hak mewarisi harta warisan orang tua angkatnya.

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa anak angkat yang diambil anak orang lain sebagai anak sendiri dalam pemeliharaan, pendidikan dan tanggungjawab lainnya berdasarkan proses hukum yang sah dan tidak mengganggu status nasabnya.

## **B. Dasar Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam**

---

<sup>46</sup> Mahmud Saltut, *AlFatawa*, cet III, Kairo, Dar al Qalam, hal 321

Dasar hukum pengangkatan anak ini dinyatakan dalam beberapa surat dalam Al-Qur'an yaitu :

1. Anak angkat harus tetap dipanggil dengan nasab ayah kandungnya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab 4-5 yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya : Allah tidak menjadikan bagi seorang dua buah hati dalam rongganya: Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar sebagai ibumu. dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu ( sendiri ). Yang demikian itu adalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkkan jalan yang ( benar ). Pangillah mereka ( anak-anak angkatmu itu ) dengan ( memakai ) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka ( panggillah mereka sebagai ) saudara-saudaramu seagama dan “maulamu”. Dan tidak ada atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetap ( yang ada dosanya ) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah allah maha pengampun lagi maha penyayang.<sup>47</sup>

Yang dimaksud dengan tanda petik diatas “maula”dalam ayat tersebut ialah budak yang telah dimerdekakan atau seorang yang telah dijadikan anak angkat, seperti seorang yang bernama salim anak angkat hudzaifah dipanggil salim maula hudzaifah.

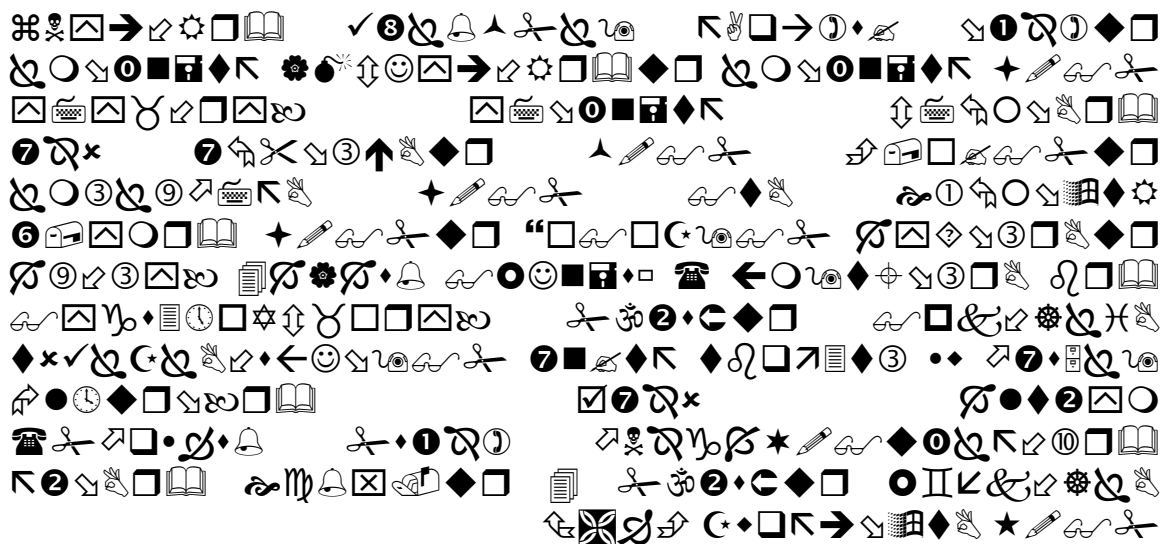
<sup>47</sup> Q.S Al-Ahzab Ayat 4-5

Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa adopsi hanyalah merupakan pengakuan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Pengakuan dalam adopsi tidak dapat merubah kenyataan, bahwa anak angkat dilahirkan oleh ibunya dari ayahnya sendiri. Melepaskan anak dari hubungan nasab ayah dan ibunya sama sekali tidak dibenarkan karena bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya disatu pihak dan bertentangan dengan pembawaan watak kodrati manusia dipihak lain.

Dengan turunnya ayat 4-5 surat al-ahzab tersebut, Kemudian status zaid bin haritsah bukan lagi sebagai anak angkat ( yang berlaku sebagai anak kandung) nabi muhammad saw, tetapi zaid tetap dalam asuhan dan pemeliharaan beliau seperti sediakala, zaid tetap mengikuti nabi muhammad saw.

2. Janda anak angkat bukanlah mahrom orang tua angkat, sebagaimana disebutkan

dalam surat Al-Ahzab Ayat 37 sebagai berikut :



Artinya : Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya. Tahanlah terus isterimu dan bertaqwalah kepada Allah, sedang kamu menyembunyikan didalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia sedang Allahlah yang paling berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya, kami

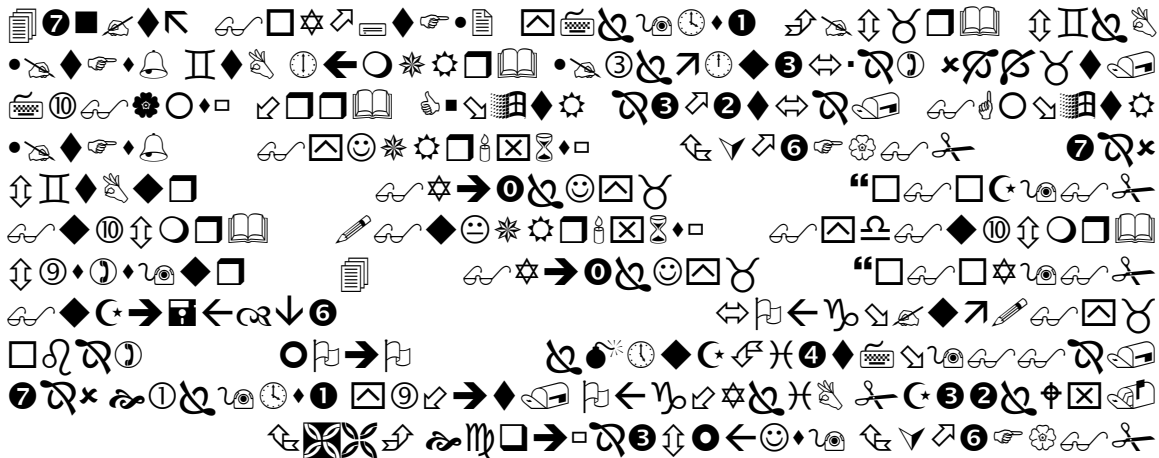
kawinkan kamu dengan isterinya supaya tidak ada keberatan lagi orang mu'min untuk mengawini isteri-isteri anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluan mereka dari pada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.<sup>48</sup>

3. Nabi Muhammad Bukan ayah seorang laki-laki diantara kalian. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat al-Ahzab ayat 40 :



Artinya : “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki diantara kamu, tetapi ia adalah Rosulullah dan penutup nabi-nabi dan adalah Allah maha mengetahui segala sesuatu.”<sup>49</sup>

4. mengangkat anak sama dengan memberi harapan hidup bagi masa depan anak sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 32



Artinya : “Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka ia seolah-olah memelihara kehidupan manusia seluruhnya”<sup>50</sup>.

<sup>48</sup> Q.s Al-Ahzab Ayat 37

<sup>49</sup> Q.S.Al-Ahzab Ayat 40

<sup>50</sup> Q.S.Al-Baqarah Ayat 177

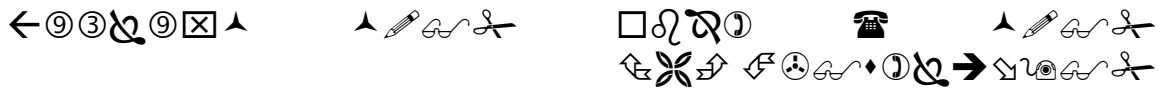
Allah telah berfirman dalam surat Al- Ahzab Ayat 5

Artinya : “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>51</sup>.

Allah telah berfirman dalam surat Al-Maidah Ayat 2

•• ☎ 𐀀 𐀁 𐀂 𐀃 𐀄 𐀅 𐀆 𐀇 𐀈 𐀉 𐀊 𐀋 𐀌 𐀍 𐀎 𐀏 𐀐 𐀑 𐀒 𐀓 𐀔 𐀕 𐀖 𐀗 𐀘 𐀙 𐀚 𐀛 𐀜 𐀝 𐀞 𐀟 𐀠 𐀡 𐀢 𐀣 𐀤 𐀥 𐀦 𐀧 𐀨 𐀩 𐀪 𐀫 𐀬 𐀭 𐀮 𐀯 𐀰 𐀱 𐀲 𐀳 𐀴 𐀵 𐀶 𐀷 𐀸 𐀹 𐀺 𐀻 𐀼 𐀽 𐀾 𐀿 𐁀 𐁁 𐁂 𐁃 𐁄 𐁅 𐁆 𐁇 𐁈 𐁉 𐁊 𐁋 𐁌 𐁍 𐁎 𐁏 𐁐 𐁑 𐁒 𐁓 𐁔 𐁕 𐁖 𐁗 𐁘 𐁙 𐁚 𐁛 𐁜 𐁝 𐁞 𐁟 𐁠 𐁡 𐁢 𐁣 𐁤 𐁥 𐁦 𐁧 𐁨 𐁩 𐁪 𐁫 𐁬 𐁭 𐁮 𐁯 𐁰 𐁱 𐁲 𐁳 𐁴 𐁵 𐁶 𐁷 𐁸 𐁹 𐁺 𐁻 𐁼 𐁽 𐁾 𐁿 𐂀 𐂁 𐂂 𐂃 𐂄 𐂅 𐂆 𐂇 𐂈 𐂉 𐂊 𐂋 𐂌 𐂍 𐂎 𐂏 𐂐 𐂑 𐂒 𐂓 𐂔 𐂕 𐂖 𐂗 𐂘 𐂙 𐂚 𐂛 𐂜 𐂝 𐂞 𐂟 𐂠 𐂡 𐂢 𐂣 𐂤 𐂥 𐂦 𐂧 𐂨 𐂩 𐂪 𐂫 𐂬 𐂭 𐂮 𐂯 𐂰 𐂱 𐂲 𐂳 𐂴 𐂵 𐂶 𐂷 𐂸 𐂹 𐂺 𐂻 𐂼 𐂽 𐂾 𐂿 𐃀 𐃁 𐃂 𐃃 𐃄 𐃅 𐃆 𐃇 𐃈 𐃉 𐃊 𐃋 𐃌 𐃍 𐃎 𐃏 𐃐 𐃑 𐃒 𐃓 𐃔 𐃕 𐃖 𐃗 𐃘 𐃙 𐃚 𐃛 𐃜 𐃝 𐃞 𐃟 𐃠 𐃡 𐃢 𐃣 𐃤 𐃥 𐃦 𐃧 𐃨 𐃩 𐃪 𐃫 𐃬 𐃭 𐃮 𐃯 𐃰 𐃱 𐃲 𐃳 𐃴 𐃵 𐃶 𐃷 𐃸 𐃹 𐃺 𐃻 𐃼 𐃽 𐃾 𐃿 𐄀 𐄁 𐄂 𐄃 𐄄 𐄅 𐄆 𐄇 𐄈 𐄉 𐄊 𐄋 𐄌 𐄍 𐄎 𐄏 𐄐 𐄑 𐄒 𐄓 𐄔 𐄕 𐄖 𐄗 𐄘 𐄙 𐄚 𐄛 𐄜 𐄝 𐄞 𐄟 𐄠 𐄡 𐄢 𐄣 𐄤 𐄥 𐄦 𐄧 𐄨 𐄩 𐄪 𐄫 𐄬 𐄭 𐄮 𐄯 𐄰 𐄱 𐄲 𐄳 𐄴 𐄵 𐄶 𐄷 𐄸 𐄹 𐄺 𐄻 𐄼 𐄽 𐄾 𐄿 𐅀 𐅁 𐅂 𐅃 𐅄 𐅅 𐅆 𐅇 𐅈 𐅉 𐅊 𐅋 𐅌 𐅍 𐅎 𐅏 𐅐 𐅑 𐅒 𐅓 𐅔 𐅕 𐅖 𐅗 𐅘 𐅙 𐅚 𐅛 𐅜 𐅝 𐅞 𐅟 𐅠 𐅡 𐅢 𐅣 𐅤 𐅥 𐅦 𐅧 𐅨 𐅩 𐅪 𐅫 𐅬 𐅭 𐅮 𐅯 𐅰 𐅱 𐅲 𐅳 𐅴 𐅵 𐅶 𐅷 𐅸 𐅹 𐅺 𐅻 𐅼 𐅽 𐅾 𐅿 𐆀 𐆁 𐆂 𐆃 𐆄 𐆅 𐆆 𐆇 𐆈 𐆉 𐆊 𐆋 𐆌 𐆍 𐆎 𐆏 𐆐 𐆑 𐆒 𐆓 𐆔 𐆕 𐆖 𐆗 𐆘 𐆙 𐆚 𐆛 𐆜 𐆝 𐆞 𐆟 𐆠 𐆡 𐆢 𐆣 𐆤 𐆥 𐆦 𐆧 𐆨 𐆩 𐆪 𐆫 𐆬 𐆭 𐆮 𐆯 𐆰 𐆱 𐆲 𐆳 𐆴 𐆵 𐆶 𐆷 𐆸 𐆹 𐆺 𐆻 𐆼 𐆽 𐆾 𐆿 𐇀 𐇁 𐇂 𐇃 𐇄 𐇅 𐇆 𐇇 𐇈 𐇉 𐇊 𐇋 𐇌 𐇍 𐇎 𐇏 𐇐 𐇑 𐇒 𐇓 𐇔 𐇕 𐇖 𐇗 𐇘 𐇙 𐇚 𐇛 𐇜 𐇝 𐇞 𐇟 𐇠 𐇡 𐇢 𐇣 𐇤 𐇥 𐇦 𐇧 𐇨 𐇩 𐇪 𐇫 𐇬 𐇭 𐇮 𐇯 𐇰 𐇱 𐇲 𐇳 𐇴 𐇵 𐇶 𐇷 𐇸 𐇹 𐇺 𐇻 𐇼 𐇽 𐇾 𐇿 𐈀 𐈁 𐈂 𐈃 𐈄 𐈅 𐈆 𐈇 𐈈 𐈉 𐈊 𐈋 𐈌 𐈍 𐈎 𐈏 𐈐 𐈑 𐈒 𐈓 𐈔 𐈕 𐈖 𐈗 𐈘 𐈙 𐈚 𐈛 𐈜 𐈝 𐈞 𐈟 𐈠 𐈡 𐈢 𐈣 𐈤 𐈥 𐈦 𐈧 𐈨 𐈩 𐈪 𐈫 𐈬 𐈭 𐈮 𐈯 𐈰 𐈱 𐈲 𐈳 𐈴 𐈵 𐈶 𐈷 𐈸 𐈹 𐈺 𐈻 𐈼 𐈽 𐈾 𐈿 𐉀 𐉁 𐉂 𐉃 𐉄 𐉅 𐉆 𐉇 𐉈 𐉉 𐉊 𐉋 𐉌 𐉍 𐉎 𐉏 𐉐 𐉑 𐉒 𐉓 𐉔 𐉕 𐉖 𐉗 𐉘 𐉙 𐉚 𐉛 𐉜 𐉝 𐉞 𐉟 𐉠 𐉡 𐉢 𐉣 𐉤 𐉥 𐉦 𐉧 𐉨 𐉩 𐉪 𐉫 𐉬 𐉭 𐉮 𐉯 𐉰 𐉱 𐉲 𐉳 𐉴 𐉵 𐉶 𐉷 𐉸 𐉹 𐉺 𐉻 𐉼 𐉽 𐉾 𐉿 𐊀 𐊁 𐊂 𐊃 𐊄 𐊅 𐊆 𐊇 𐊈 𐊉 𐊊 𐊋 𐊌 𐊍 𐊎 𐊏 𐊐 𐊑 𐊒 𐊓 𐊔 𐊕 𐊖 𐊗 𐊘 𐊙 𐊚 𐊛 𐊜 𐊝 𐊞 𐊟 𐊠 𐊡 𐊢 𐊣 𐊤 𐊥 𐊦 𐊧 𐊨 𐊩 𐊪 𐊫 𐊬 𐊭 𐊮 𐊯 𐊰 𐊱 𐊲 𐊳 𐊴 𐊵 𐊶 𐊷 𐊸 𐊹 𐊺 𐊻 𐊼 𐊽 𐊾 𐊿 𐋀 𐋁 𐋂 𐋃 𐋄 𐋅 𐋆 𐋇 𐋈 𐋉 𐋊 𐋋 𐋌 𐋍 𐋎 𐋏 𐋐 𐋑 𐋒 𐋓 𐋔 𐋕 𐋖 𐋗 𐋘 𐋙 𐋚 𐋛 𐋜 𐋝 𐋞 𐋟 𐋠 𐋡 𐋢 𐋣 𐋤 𐋥 𐋦 𐋧 𐋨 𐋩 𐋪 𐋫 𐋬 𐋭 𐋮 𐋯 𐋰 𐋱 𐋲 𐋳 𐋴 𐋵 𐋶 𐋷 𐋸 𐋹 𐋺 𐋻 𐋼 𐋽 𐋾 𐋿 𐌀 𐌁 𐌂 𐌃 𐌄 𐌅 𐌆 𐌇 𐌈 𐌉 𐌊 𐌋 𐌌 𐌍 𐌎 𐌏 𐌐 𐌑 𐌒 𐌓 𐌔 𐌕 𐌖 𐌗 𐌘 𐌙 𐌚 𐌛 𐌜 𐌝 𐌞 𐌟 𐌠 𐌡 𐌢 𐌣 𐌤 𐌥 𐌦 𐌧 𐌨 𐌩 𐌪 𐌫 𐌬 𐌭 𐌮 𐌯 𐌰

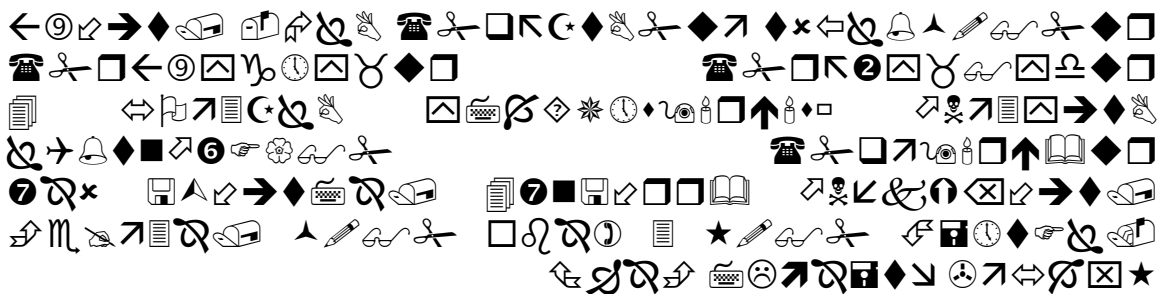
<sup>51</sup> Q.S Al-Ahzab Ayat 5



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya[391], dan binatang-binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[393] dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.<sup>52</sup>

7. Dalam hal warisan, kerabat dekat tidak boleh diabaikan lantaran adanya anak angkat.

sebagaimana allah telah berfirman dalam surat Al-Anfal Ayat 75



Artinya : Orang yang mempunyai hubungan kekerabatan itu, s ebagiaannyua lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabatnya, didalam kitab Allah sesungguhnya Allah mengetahui sesuatu.<sup>53</sup>

Pengangkatan adalah suatu tindakan hukum dan oleh karenanya tentu akan pula menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu sebagai akibat hukum dari pengangkatan anak menurut hukum islam adalah sebagai berikut :

1. Beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya (Pasal 171

<sup>52</sup> Q.S.Al-Maidah Ayat 2

<sup>53</sup> Q.S.Al-Anfal Ayat 75



huruf ( h ) Kompilasi Hukum Islam). Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya ( Pasal 171 huruf ( h ) Kompilasi Hukum Islam ). Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut untuk itu.

2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orang tua kandung dengan keluarganya, sehingga antara mereka tetap berlaku hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi.
3. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orangtua angkatnya, sehingga antara mereka tidak ada hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi
4. Pengangkatan anak menimbulkan hubungan hukum yang beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya ( Pasal 171 huruf ( h ) Kompilasi Hukum Islam ). Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut untuk itu.
5. Mereka antara anak angkat dan ayah kandungnya tetap berlaku hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi.

### **C. Motivasi Pengangkatan Anak**

Motivasi merupakan suatu pengertian yang melingkupi penggerak, alasan-alasan, dorongan yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu<sup>54</sup>. Misalnya seseorang menjadi anggota perkumpulan maka motivasinya antara lain ingin sesuatu yang baru bersama anggota perkumpulannya tersebut. Dalam kaitannya dengan pengangkatan anak berarti adanya alasan-alasan atau dorongan seseorang melakukan perbuatan hukum mengangkat anak.

Masalah pengangkatan anak bukanlah termasuk masalah baru di Indonesia. Sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup dan berkembang di daerah yang bersangkutan. Di Indonesia sendiri terdapat motivasi yang berbeda-beda.

Motivasi pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan<sup>55</sup>. Motivasi ini adalah salah satu jalan keluar dan alternatif manusia terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarganya setelah bertahun-tahun tidak dikaruniai anak. Keluarga mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Akan tetapi ketiga unsur belum tentu terpenuhi sehingga kadang-kadang terdapat suatu tidak mempunyai anak atau tidak mempunyai ibu. Dengan demikian dilihat dari segi eksistensi keluarga sebagai kelompok-kelompok kehidupan masyarakat, menyebabkan mereka menginginkan anak karena alasan yang demikian sehingga terjadilah perpindahan anak dari suatu kelompok keluarga yang lain.

---

<sup>54</sup> W.A. Gerungan Dipl, Psych, *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*, cet V, Jakarta, Eresco, 1977, hal. 142

<sup>55</sup> Soerojo Wignyodipuro, *Opcit*, hal. 119

Kenyataan ini sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Dalam masyarakat adat telah dikenal pengangkatan anak dari suatu keluarga untuk dijadikan anaknya sendiri dengan bermacam-macam istilah seperti anak.

Pupon (Jawa) anak pulung atau anak kukut (Sunda) anak pungut (Jakarta)<sup>56</sup>

Pada umumnya orang lebih suka mengangkat anak dari kalangan keluarga sendiri, dengan berbagai peraturan yang hidup dalam masyarakat. Kemudian berkembang dimana orang tidak membatasi dari kalangan sendiri, tapi juga terhadap orang lain diluar keluarganya sendiri dan telah disadari orang yang terpenting dalam masalah pengangkatan anak adalah demi kebahagiaan anak. Hal ini dipandang bahwa anak mempunyai hak untuk berkembang dan hidup secara wajar baik jasmani, rohani, dan sosial. Sehingga sebaiknya mencari akan orang tua angkat bagi seorang anak dan diarahkan kepada kesesuaian antara orang tua angkat dan anak angkat.

Dari berbagai macam motivasi dan latar belakang yang berkembang maka alasan dari motivasi yang paling menonjol adalah karena tidak mempunyai anak.

Motivasi pengangkatan anak di daerah hukum adat yang sistem clannya atau kerabatnya masih kental pengangkatan anak diluar clan pada umumnya karena kekhawatiran akan habis mati kerabatnya. Keluarga yang tidak mempunyai anak dalam lingkungan kekuasaan kerabatnya, bersama-sama kerabatnya mengangkat seorang anak sebagai perbuatan kerabat. Anak tersebut menduduki seluruh kedudukan anak kandung dari ayah-ibu yang mengangkatnya dan terlepas dari kerabatnya semula. Pengangkatan ini harus dilakukan melalui upacara-upacara tertentu dengan bantuan kepala adat setempat dan disaksikan oleh khalayak ramai dan diketahui oleh para anggota keluarga

---

<sup>56</sup> R. Soepomo, Alih Bahasa Nani Soewondo, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*, Jakarta, Jambata, 1992, hal. 24

dari yang mengangkat anak, agar menjadi jelas dan statusnya menjadi terang bagi anggota kerabat. Motivasi seperti ini terdapat di adat Nias, Gayo, Lampung dan Kalimantan.<sup>57</sup>

Di daerah Jakarta terdapat bermacam-macam motivasi pengangkatan anak, terutama karena kasihan dengan seorang anak yang terlantar. Disamping itu ada motivasi lain yaitu mendapatkan tenaga kerja dalam kehidupan sehari-hari atau mendapatkan seseorang yang memelihara di hari tua, dan sekaligus sebagai tangan kanan dalam rumah tangganya serta nantinya akan menjadi ahli waris dan akan menyelenggarakan kematiannya. Hal ini berbeda dengan di Jawa Barat tujuan dari pengangkatan anak agar mendapatkan atau sebagai pancingan kehadiran seorang bayi.

Demikianlah seorang suami istri yang mulai kecewa karena sudah lama menikah, tapi belum dikarunia anak, lalu mengangkat dengan harapan sesuai dengan kepercayaan mereka akan mendapatkan anak<sup>58</sup>. Keyakinan mereka sering disusui ( ditetrekoiisunda ) oleh anak kecil, maka mereka mengandung dan memperoleh anak.

Dilihat dari jenis kelaminnya, Pada umumnya tidak ada perbedaan baik laki-laki maupun perempuan. Motivasi ini dilakukan oleh yang bersangkutan karena hanya mempunyai anak laki-laki saja, maka diangkatlah anak perempuan dan sebaliknya. Pada suku Semendo atau suku Dayak di Kalimantan barat biasanya mengangkat anak perempuan tanpa terikat oleh clan, supaya mendapat anak perempuan yang dapat mengurus harta kekayaan, sehingga anak perempuan mendapat kedudukan seperti anak

---

<sup>57</sup> Terhaar Bzn, Alih Bahasa K.Ng. Soebekti Poesponoto, *Azas-Azas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramits, 1974, hal. 182

<sup>58</sup> Bastian Taufal, *Pengangkatan Anak menurut Adat dan akibat hukumnya*, cet 2, Jakarta, Rajawali Press, 1989, hal. 60

laki-laki. Pada suku bangsa yang terakhir ini apabila anak yang tertua kawin, maka suaminya harus tinggal dirumahnya, karena ia sebagai pemelihara pusaka keluarga.<sup>59</sup>

Dari apa yang dikemukakan diatas jelaslah terlihat adanya kesan bahwa eksistensi lembaga pengangkatan anak merupakan suatu keperluan masyarakat yang mengandung unsur-unsur positif. Sebagai salah satu kebutuhan masyarakat yang positif dapat dilihat dari motif-motif yang mendasari adanya lembaga pengangkatan anak di Indonesia antara lain :

- a) Rasa kasihan terhadap anak yang terlantar atau anaknya orang yang tidak mampu memeliharanya
- b) Tidak mempunyai anak dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memelihara dihari tua
- c) Untuk mendapatkan teman anaknya
- d) Untuk mendapatkan tenaga kerja
- e) Untuk mempertahankan ikatan perkawinan dan kebahagiaan keluarga.

Demikian antara lain beberapa motivasi pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang-orang yang berkepentingan di Indonesia yang tersebar di masyarakat adat, sehingga adanya lembaga pengangkatan anak ini adalah merupakan kebutuhan masyarakat Indonesia.

#### **D. Biaya Hidup dan Pendidikan Anak Angkat**

Telah kita maklumi bahwa manusia sebagi subyek dalam hukum, setiap berbuat atau melakukan perbuatan hukum tentu saja akan merasakan atau menerima akibat

---

<sup>59</sup> P.Soepomo, *Hubungan Individu dan masyarakat dalam hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1983, hal. 10

hukum yang timbul karenanya, baik hal itu menyangkut bidang hukum pidana maupun hukum perdata.

Termasuk dalam hal ini ialah perbuatan seseorang atau keluarga yang melakukan pengangkatan anak ( adopsi ), maka ia harus mau menerima resiko sebagai akibat hukum yang ditimbulkannya.

Akibat dari suatu pengangkatan anak adalah hadirnya anak angkat ditengah-tengah keluarga angkat. Anak angkat sebagai manusia yang sekaligus dapat dikatakan sebagai subyek hukum akan memperoleh hak yang harus ditunaikan dari orang tua angkatnya. Atau dengan kata lain orang tua angkat mempunyai kewajiban untuk memelihara anak angkatnya.

Kewajiban orang tua angkat dapat dilihat dari Kompilasi hukum Islam pasal 171 huruf (h) yakni “anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”<sup>60</sup>

Dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam diatas dapat dipahami bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak angkat menjadi tanggungjawab atau kewajiban orang tua angkatnya. Artinya bahwa anak angkat berhak atas pemeliharaan, pendidikan dan sebagainya dari orang tua angkatnya.

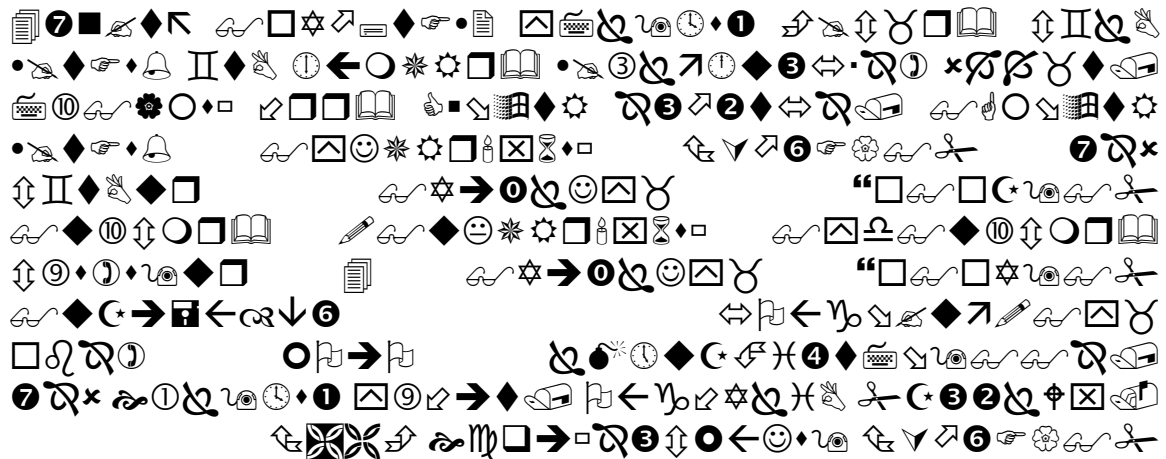
Ketentuan kompilasi hukum Islam secara jelas telah mengemukakan bahwa orang tua angkat wajib memberikan atau menyediakan nafkah pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak angkatnya tanpa dinasabkan kepada dirinya.

Hal ini jelas sesuai dengan hukum Islam, bahwa perbuatan tersebut berarti menghidupkan jiwa manusia dengan harapan agar anak tersebut berguna bagi agama,

---

<sup>60</sup> *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal 171 (h)

Negara dan bangsanya. Karena anak yang diangkat pada umumnya anak angkat dari kalangan keluarga yang tidak mampu, yatim dan anak terlantar<sup>61</sup>. Sehingga mereka kehilangan orang tua yang membiayainya. Allah berfirman :



Artinya : Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

Dan firman Allah :



Artinya : Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada yang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan<sup>62</sup>.

<sup>61</sup> Mahmud Saltut, *Al-Fatawa*, cet III, Kairo, Dar-Al-Qalam, hal 322

<sup>62</sup> Q.S. Al-Ihsaan (76) Ayat : 8

Dari dua ayat diatas dapat dipahami bahwa anak terlantar atau anak miskin atau anak yatim, sulit bagi mereka untuk menempuh jalan hidupnya. Oleh karena itu mereka lebih berhak menerima belas kasihan, pemeliharaan, dan bantuan orang lain.

Disamping itu berdasarkan ayat diatas dapat menggugah dan membuka hati para dermawan dan sosiawan untuk memperhatikannya, yakni untuk menolong mereka dengan memenuhi kebutuhan hidup mereka yang utama serta memeliharanya.

Dengan keterangan diatas jelas bahwa ada semacam pengangkatan anak yang dianggap oleh beberapa orang, tetapi hakekatnya bukan pengangkatan anak yang diharamkan oleh Islam. Yaitu seseorang mengambil anak orang lain kemudian ia jadikan anaknya sendiri baik tentang kasih sayang, pemeliharaan maupun pendidikannya. Tetapi bedanya dia tidak dinasabkan kepada dirinya dan tidak diperlakukan padanya hukum-hukum yang lain.

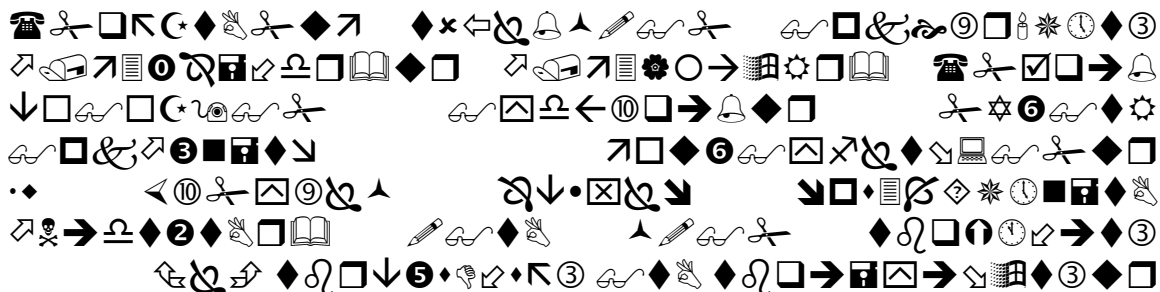
Persoalan yang perlu dipertanyakan adalah, sejak kapankah kewajiban orangtua angkat untuk mendidik anak angkat itu berakhir? Dan sejak kapan pula anak angkat itu sudah dianggap dapat berdiri sendiri tanpa bantuan atau pertolongan orang tua angkatnya.

Secara khusus tidak ada ketentuan yang menjelaskan tentang batas kewajiban orang tua angkat berakhir. Tetapi apabila kita perhatikan terdapat ketentuan kewajiban orang tua terhadap anaknya, UU No.1 Tahun 1974 Pasal 45 jo Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) telah menjelaskan bahwa batas akhir kewajiban orang tua untuk memelihara anak sekaligus mendidiknya sampai pada saat anak sudah kawin atau sudah dapat berdiri sendiri untuk mengurus kepentingan hidup dan kehidupannya dan kehidupannya tanpa mendidik anak itu sampai mencapai kedewasaan secara penuh baik jasmani maupun rohani.



Orang tua sebagai manusia biasa yang tidak dapat lepas dari sifat keterbatasan didalam menjalankan tugas dan kewajiban untuk mendidik sudah dipasti akan memerlukan bantuan pertolongan orang lain. Sebagai contoh menyekolahkan anak untuk memperlancar proses pendewasaan anak tidak dapat dilakukan oleh orang tua tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu masalah pendidikan di sekolah mau tidak mau untuk memperlancar proses pendewasaan anak tidak dapat dilakukan oleh orang tua tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu masalah pendidikan disekolah mau tidak mau menjadi kewajiban dari orang tua berikut dengan segala dana, dan biaya untuk kepentingan pendidikan.

Adapun tujuan yang dicapai didalam pendidikan anak disebutkan dalam Al Qur'an :



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka<sup>63</sup>”

Dari ayat diatas dapat diambil adanya pelajaran bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan untuk bisa menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Perintah menjaga diri dan keluarga dari bahaya api neraka itu apabila ditinjau dari segi pendidikan berarti adanya suatu perintah agar kita mendidik diri dan keluarga untuk mendidik diri dan keluarga untuk memiliki kekuatan jiwa yang mampu menahan perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan kepada kesesatan.

<sup>63</sup> Q.S. At-Tahrim (66) Ayat : 6

Dalam masalah pendidikan anak akan lebih jelas apabila diperhatikan hadist Nabi yang artinya sebagai berikut : “Apabila anak adam mati maka terputuslah segala amalnya, kecuali tiga yaitu ; shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”<sup>64</sup>.

Hadist tersebut diatas mengajarkan kepada kita bahwa tujuan pendidikan anak menurut ajaran Islam adalah menjadikan anak bertabiat sholeh.

Untuk memperoleh gambaran tentang tabiat sholeh yang menjadi tujuan pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Menanamkan jiwa kepada Allah secara murni yaitu keimanan tauhid yang tidak berbau kemusyrikan sedikitpun.
2. Menanamkan rasa wajib berbuat baik dan bersikap hormat kepada orang tua, meskipun berbeda keyakinan agamanya.
3. Menanamkan rasa wajib memperlakukan Allah atas kesadaran bahwa Allah maha mengetahui kepada semua perbuatan manusia, tiada suatu perbuatanpun dapat luput dari pengetahuan Allah.
4. Menanamkan rasa tanggung jawab kemasyarakatan, mengajak masyarakat untuk berbuat kebajikan dan tidak membiarkan mereka dihindangi penyakit-penyakit sosial yang akan menjerumuskan kepada kehancuran.
5. Menanamkan rasa wajib bersikap hormat kepada sesama, tidak congkak dan tidak sombong, baik dalam perbuatan maupun perkataan.<sup>65</sup>

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa orang tua berkewajiban menyampaikan atau memberikan pendidikan kepada anaknya, dalam soal ini islam sangat mementingkan pendidikan yang dapat menanamkan jiwa tauhid pada diri anak.

## **E. Hak-Hak dan Kewajiban Anak Angkat**

Perlindungan terhadap anak angkat di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan

---

<sup>64</sup> Jalaludin Abdurrahman Bin Abi Bakar as Suyuti, *AL-Jami' As-Shoghir*, Jilid I, Baitut, Dar Al- Fikri, hal 130

<sup>65</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, 1980, hal. 103

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Anak angkat dan anak-anak lain pada hakekatnya adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat hak-hak yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orangtua angkatnya dan masyarakat pada umumnya, hak-hak anak angkat yang dimaksud adalah :

1. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
2. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
3. Berhak untuk beribadah menurut agamanya berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtuanya
4. Berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh orangtuanya sendiri
5. Dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat oleh orang tua lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
7. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
8. Khusus untuk anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan untuk anak yang mempunyai keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus
9. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri
10. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
11. Setiap anak yang dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
  - a. diskriminasi
  - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
  - c. penelantaran
  - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
  - e. ketidakadilan
12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik
  - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata
  - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial
  - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
  - e. pelibatan dalam peperangan
13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum
14. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum wajib dirahasiakan
15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.<sup>66</sup>

Disamping hak-hak yang dijamin oleh undang-undang tersebut, anak-anak dan atau termasuk anak angkat memiliki kewajiban-kewajiban sebagai kewajiban asasi yang juga harus dilaksanakan seorang anak yaitu bahwa setiap anak berkewajiban untuk :

- 1. menghormati orang tuanya, wali, dan guru
- 2. mencintai keluarga, dan menyayangi teman
- 3. mencintai tanah air dan Negara
- 4. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- 5. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia<sup>67</sup>

## **F. Kedudukan Anak Angkat**

Sudah menjadi naluri manusia, bahwa kebahagiaan dan keharmonisan suatu keluarga ditandai dengan lahirnya seorang anak karena memang salah satu tujuan perkawinan adalah untuk meneruskan keturunan dan untuk menjaga nasab.

Mengingat kehadiran seorang anak adalah suatu hal yang sangat di idam-idamkan oleh suatu keluarga, maka apabila ada suatu keluarga yang tidak dikaruniai anak, dimana keinginannya untuk mempunyai anak adalah naluri manusia dan alamiah. Akan tetapi naluri itu terbentuk oleh takdir ilahi, yang dikehendaki untuk mempunyai anak tidak

---

<sup>66</sup> Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007, hal 219

<sup>67</sup> *Ibid*, hal 222

tercapai, dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut adalah dengan cara mengambil anak (adopsi).

Perbuatan mengangkat anak tersebut mempunyai akibat hukum. Menurut ketentuan Staatblad 1917 no.129 akibat hukum dari pengangkatan anak adalah :

1. anak yang diangkat secara hukum memperoleh nama dari orang tua angkatnya
2. anak angkat dijadikan sebagai anak yang lahir dari perkawinan orang tua angkatnya,<sup>68</sup>

Dari keterangan diatas dapat diambil pengertian bahwa menurut staatblad 1917 no.129, anak angkat mempunyai kedudukan sebagai anak sendiri (kandung) dari orang tua angkatnya sebagaimana anak yang lahir dari perkawinan orang tau angkatnya. Demikian juga anak angkat menjadi ahli waris dari orang tau angkatnya.

Sedangkan hak mewarisi anak yang diangkat “posthume” adalah anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan. Karena ketentuan ini, maka anak angkat tidak mempunyai bagian yang ditentukan<sup>69</sup>.

Dari beberapa keterangan diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa pengangkatan anak menurut hukum perdata (BW) mempunyai akibat hukum anak angkat mempunyai kedudukan seperti anak kandung dan memperoleh bagian warisan dari orang tua angkatnya.

Sedangkan pengangkatan anak menurut hukum adat mempunyai akibat hukum yang berbeda-beda baik mengenai kedudukannya maupun kewarisannya. Hal ini tergantung pada kelembagaan pengangkatan anak (sistem hukum) yang hidup dan berkembang didaerah yang bersangkutan.

---

<sup>68</sup> M. Budiarto, *Op.cit*, hal 98

<sup>69</sup> Hartono Suryopratiknyo, *Hukum waris tanpa wasiat*, cet 2, Yogyakarta, Fakultas Hukum UGM, 1985, hal. 62

Di Jawa (timur, barat dan tengah) pengangkatan anak tidak memutuskan tali kekerabatan antara anak yang diangkat dan orang tuanya sendiri, anak angkat hanya sebagai anggota rumah tangga orang tua angkatnya (gezinlid), ia tidak berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya.

Dalam hal warisan, anak angkat dapat mewarisi harta orang tuanya sendiri dan juga mewarisi harta gono-gini orang tua angkatnya, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung no.37/k/Sip/1959, Tanggal 18 Maret 1959.

Dalam hal ini anak bukanlah ahli waris terhadap barang asal (harta pusaka) orang tua angkatnya, melainkan ia mendapat keuntungan sebagai anggota rumah tangga, juga setelah orang tua angkatnya meninggal dunia anak angkat mendapat bagian harta gono-gini tidak mencukupi anak angkatnya, apabila orang tua angkatnya tidak mempunyai anak kandung. Hal ini sesuai dengan putusan Raad Justisi Jakarta tanggal 26 Mei 1939 bahwa apabila barang gono-gini tidak mencukupi pada pembagian harta peninggalan oleh para ahli waris orang tua angkat, maka anak angkat boleh meminta bagian dari harta asal sehingga menurut keadaan dianggap adil.

Di Bali pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan melepaskan anak dari keluarga orang tuanya sendiri dan memasukkan anak itu kedalam keluarga bapak angkatnya, sehingga anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya<sup>70</sup>.

Dalam hal ini, yang berhak mewarisi sebagai ahli waris adalah anak laki-laki dari pihak keluarga laki-laki, sesuai dengan yurisprudensi MA, no.200 K/Sip/1958, tanggal 3 Maret 1958<sup>71</sup>.

---

<sup>70</sup> Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1983, hal. 101

<sup>71</sup> Subekti, *Kumpulan Putusan MA Mengenai Hukum Adat Jakarta*, Gunung Agung, 1961, hal 93

Di Sumatera timur anak angkatnya, ia hanya berhak atas harta atau barang-barang yang telah dihibahkan oleh orangtua angkat semasa masih hidup. Hal ini berbeda dengan di Sumatera Utara yakni Batak Karo, anak angkat mempunyai kedudukan dan hak yang sama dengan anak kandung terhadap peninggalan orang tua angkatnya sebagai ahli waris. Tetapi apabila ia diangkat setelah orang tua angkatnya mempunyai anak kandung ia tidak berhak mewarisi harta pusaka asli.

Di daerah Ambon anak angkat hanya berhak mewarisi harta pencaharian dari orang tua angkatnya, dan tidak boleh mewarisi harta pusaka milik kerabat bapak angkatnya. Ia tetap atas harta warisan orang tua kandungnya sendiri.

Di Padang dan Minangkabau tidak dikenal lembaga pengangkatan anak dalam hukum adatnya, yang ada hanya pengambilan anak untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak sendiri. Anak yang diangkat biasanya masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan si pengambil anak, sedang hubungan antara anak yang diambil dengan orang tua sendiri tidak terputus.

Dalam masalah warisan ia tetap menjadi ahli waris dari orang tuanya sendiri dan si anak bukan ahli waris dari orang tua angkatnya.

Kemudian di Kalimantan khususnya di Pontianak anak angkat tidak berhak mewarisi harta orangtua angkatnya. Biasanya anak angkat mendapat bagian dari harta pusaka ayah angkatnya dengan jalan hibah atau wasiat dengan persetujuan dari ahli waris yang berhak mewarisi. Jadi dengan demikian dari beberapa daerah adat yang ada di Indonesia dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar anak angkat mendapat warisan dari harta gono-gini orang tua angkatnya.

## **H. Perwalian Anak Angkat**

Secara umum masalah perwalian anak pada umumnya diatur pada bab VII undang-undang perlindungan anak. Pasal 33 memberikan ketentuan rinciann kondisi anak dan perwaliannya pada saat itu.

Perwalian terhadap anak angkat, dapat dikaji dari aspek definisi anak angkat sebagaimana diatur Pasal 1 angka 9 UU No. 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa “anak angkat adalah: anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

Bertitik tolak dari definisi tersebut dapat dipahami, bahwa perwalian anak angkat telah beralih dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya. Jadi orang tua angkat memiliki hak dan bertanggung jawab terhadap perwalian anak angkatnya, termasuk perwalian terhadap harta kekayaan. Oleh karena itu apabila anak angkat telah dewasa, maka orang tua angkat wajib memeberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan harta kekayaan anak angkatnya tersebut.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa :

- a. Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketsahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau lembaga hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- b. Untuk menjadi wali anak yang betrada dibawah perwaliannya, dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- c. Wali yang ditunjuk sebagai wali seorang anak, agamanya agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak
- d. Untuk kepentingan anak, wali tersebut wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan



- e. Ketentuan mengenai syarat dan tatacara penunjukan wali diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah<sup>72</sup>

Wali yang ditunjuk berdasarkan putusan pengadilan tersebut, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersenbut dapat diurus oleh balai harta peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan. Balai harta peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan, bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak. Pengurus harta anak tersebut harus mendapat penetapan dari pengadilan.

Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata dikemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan. Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan

Ketentuan perwalian terhadap anak angkat diatas berbeda dengan ketentuan dalam hukum Islam, karena menurut hukum Islam anak angkat adalah anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain yang diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kenutuhannya, bukan diperlakukan sebagi anak dan menasabkan kepada dirinya.<sup>73</sup>

Yusuf Qadhawi menyatakan, bahwa apabila seseorang dilarang mengingkari nasab anak-anaknya sendiri, maka ia juga dilarang mengaku anak nasab orang lain sebagai nasabnya. Islam menganggap bahwa pengangkatan anak secara mutlak merupakan

---

<sup>72</sup> Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Op.cit*, hal 224

<sup>73</sup> *Ibid*, hal 225

pemalsuan terhadap keaslian nasab dan keturunan. Selain itu secara sosiologis, akibat pengangkatan anak secara mutlak dapat menimbulkan kedengkian diantara saudara dan kerabat, dan memutuskan hubungan persaudaraan.

#### **H. Pengangkatan Anak Pada Zaman Nabi Muhammad SAW**

Menurut istilah dalam ajaran agama Islam adopsi ini disebut dengan istilah “*Tabbani*”<sup>74</sup>. Dizaman jahiliyah sebelum Islam dating masalah *Tabanni* (adopsi) banyak didapatkan dikalangan bangsa arab. Bahkan menurut sejarah nabi Muhammad sendiri sebelum menerima kerosulan mempunyai seorang anak angkat yang bernama Zaid putra Haritsah yang berstatus budak (sahaya) yang dihadiahkan oleh Khotijah bin Khowailit kepada Muhammad bin Abdullah. Kemudian dimerdekakan oleh beliau dan diangkat menjadi anak angkat serta ditukarkannya nama anak tersebut dengan nama Zaid bin Muhammad.

Beberapa waktu setelah Muhammad diutus menjadi Rosul maka turunlah wahyu yang menegaskan masalah tersebut, seperti yang telah tersebut diatas. Setelah itu turunlah wahyu yang menetapkan tentang peraturan waris mewaris yang ditentukan hanya kepada orang-orang yang ada pertalian sedarah turunan dan perkawinan. Mulai saat itu pula Zaid bin Muhammad ditukar kembali namanya menjadi Zaid bin Haritsah.<sup>75</sup>

Dengan demikian yang bertentangan dengan ajaran agama Islam mengangkat anak ( adopsi ) dan memberikan status yang sama dengan anak kandungnya sendiri. Sedang yang dimaksud dengan pengertian anak dalam pengertian terbatas, maka kedudukan hukumnya diperbolehkan saja bahkan dianjurkan. Disini tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan, dan

---

<sup>74</sup> M.Mizan Asrori, *Pembagian Pusaka dalam Islam*, Bina Ilmu, 1981, hal 97

<sup>75</sup> *Ibid*, hal 98

pemenuhan segala kebutuhannya dan tidak diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri.<sup>76</sup>

Pengambilan anak angkat ini seperti yang tersebut diatas adalah justru merupakan satu amal baik yang dilakukan oleh sebagian orang yang mampu lagi baik hati, yang tidak dianugerahi anak oleh Allah. Mereka mematrikannya dalam satu pendekatan diri pada Allah dengan mendidik anak si fakir yang terbengkalai dari kecintaan ayahnya atau ketidakmampuan orang tuanya, tidak diragukan lagi bahwa usaha-usaha semacam itu merupakan satu amal yang ditukar, dipuji dan dipahalai.

Hal ini sebenarnya sesuai dengan nilai keadilan sosial dalam Islam. Dimana syariat Islam membuka kesempatan bagi yang kaya untuk mencapai amal itu melalui wasiat dan memberikan kepadanya hak untuk mewasiatkan sebagian dari harta peninggalannya kepada anak angkatnya untuk menutupi kebutuhan hidupnya dimasa yang akan datang. Oleh karena itulah rasa kemanusiaan yang tinggi memancar sebagai pancaran kecintaannya kepada tuhan adalah suatu nilai Islam yang sangat utama dalam usaha menegakkan keadilan sosial sebagaimana dikemukakan dalam nilai-nilai dasar perjuangan.

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua biologis dan keluarga.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkatnya melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hal 99

- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali Cuma sebagai tanda pengenalan atau alamat.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.<sup>77</sup>

## I. Sebab-Sebab untuk Menerima Warisan

Dalam ketentuan hukum Islam, sebab-sebab untuk menerima warisan ada tiga (3), yaitu:

1. Hubungan kekerabatan (*al-qarabah*)
2. Hubungan perkawinan atau semenda (*al-musabarah*)
3. Hubungan karena sebab memerdekakan budak atau hamba sahaya (*al-wala'*), atau karena perjanjian tolong menolong, namun yang terakhir ini kurang mashur.

### Ad. 1 : Hubungan kekerabatan

Dalam ketentuan hukum jahiliyah, kekerabatan menjadi sebab mewarisi adalah terbatas pada laki-laki yang telah dewasa. Kaum perempuan dan anak-anak tidak mendapat bagian. Muhammad Ali Al Shabuni, dalam bukunya *al mawaris fi al syari'ah al -islamiyah fi Dhau'al-kitab wa al-sunnah* mengatakan “ Sungguh keberadaan kaum perempuan sebelum datang sinar terang Islam, tidak diberi bagian warisan sama sekali, argumentasinya mereka tidak bisa dan tidak mampu berperang. Orang-orang Arab mengatakan “bagaimana kami memberi bagian kepada orang yang tidak bisa mengendarai kuda, tidak bisa membawa pedang, dan tidak bisa memerangi musuh” Maka mereka menolak memberi mereka bagian warisan seperti halnya mereka menolak memberi bagian kepada anak-anak kecil”<sup>78</sup>

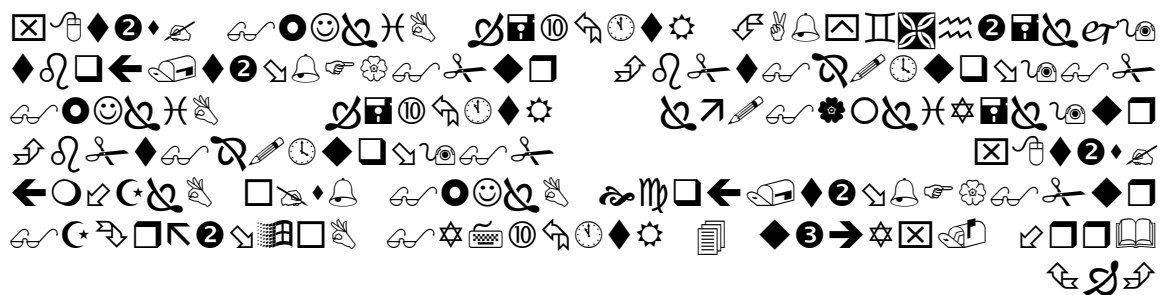
Islam datang untuk memperbarui dan merevisinya, kedudukan laki-laki dan perempuan termasuk didalamnya anak-anak, bahkan bayi yang masih didalam kandunganpun, mereka sama-sama diberi hak untuk dapat mewarisi, sepanjang hubungan

<sup>77</sup> M.Ali Hasan , *Hukum warisan dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1981, hal 59

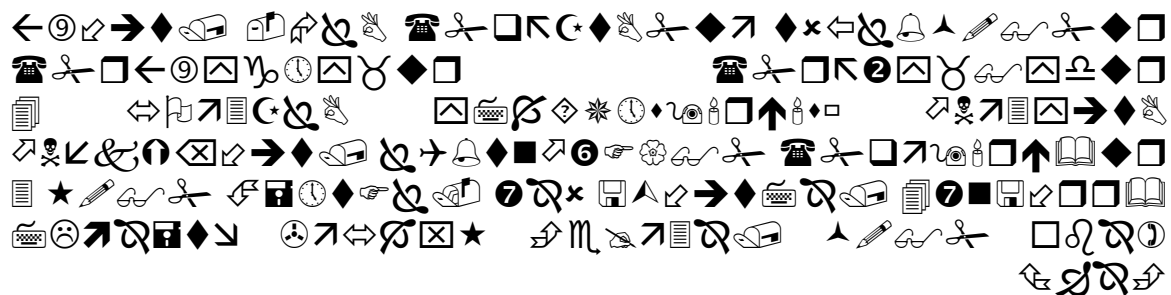
<sup>78</sup> Muhammad Ali al Shabuni, *al mawaris fi al syari'ah al -islamiyah fi Dhau'al-kitab wa al-sunnah*, Bairut, Alam al Kutub, 1399 h/ 1985 m, hal 19

kekerabatan jelas dan memperbolehkan. Artinya ada ketentuan bahwa kerabat yang dekat hubungannya, dapat menghalangi kerabat yang jauh. Adakalanya menghalangi (*menghijab*) secara keeluruhan, adakalanya menghalangi itu hanya sekedar mengurangi bagian ahli waris yang terhijab.

Dasar hukum kekerabatan sebagai ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan punya hak yang sama dalam mewaris adalah sebagai mana firman allah dalam surat An-Nisa' Ayat ( 7 ) dan surat Al- Anfal Ayat ( 75 ), yaitu :



Artinya : Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan<sup>79</sup>.



Artinya : Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap

<sup>79</sup> A.S. An-Nisa' Ayat (7)

sesamanya (daripada yang bukan kerabat)[626] di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu<sup>80</sup>.

[626] Maksudnya: yang Jadi dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara muhajirin dan anshar pada permulaan Islam

Ada 2: Hubungan Perkawinan (*al-mushabarah*),

Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi, baik menurut ketentuan hukum agama maupun ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan sangat diperlukan untuk membuktikan secara yuridis formal, bahwa dua orang telah melakukan perkawinan. Sehingga dengan pencatatan tersebut bisa diketahui apakah hubungan perkawinan masih berlaku, apabila salah satu pihak ada yang meninggal dunia. Demikian juga untuk membuktikan kekerabatan anak-anak dari perkawinan itu, sebab jika tidak ada bukti yang tertulis ahli waris yang jauh menyangkal bahwa perkawinan itu tidak pernah ada, karena ingin menguasai harta warisan si mati. Tentu hal ini sangat merugikan pihak-pihak yang sebenarnya lebih berhak untuk mendapatkan warisan.

Termasuk isteri dalam status perkawinan adalah ister-isteri yang diceraikan *raj'i*, yaitu cerai yang dalam hal ini suami lebih berhak untuk merujuknya ketimbang orang lain, yaitu cerai pertama atau kedua, selama dalam masa tunggu (*iddah*).<sup>81</sup>

Ada 3: Hubungan Memerdekakan budak atau hamba sahaya (*al-wala'*)

---

<sup>80</sup> Q.S. Al-Anfal Ayat (75)

<sup>81</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris (edisi revisi)*, Jakarta, Raja Grafinso, 2001, hal. 45

*Al-wala'* adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong. *Al-wala'* yang pertama disebut *wala' al 'ataqab* atau *'ushubah ashoboiyah*, dan yang kedua disebut *wala' al mawalah*, yaitu *wala'* yang timbul akibat kesediaan seseorang untuk saling tolong menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian.

Sedangkan menurut A.Hasan, sebab-sebab orang mendapatkan harta pusaka itu ada tiga macam, sebagai berikut :

- f. nasab, ialah perhubungan keluarga diantara mereka,
- g. nikah, ialah perkawinan seseorang dapat harta pusaka karena menjadi suami-isteri.
- h. *Wala'* ialah hak mendapatkan harta pusaka karena memerdekakan hamba sahaya atau budak.<sup>82</sup>

Dari definisi diatas jelas bahwa hukum islam (alqur'an dan hadist), tidak memberikan hak bagi anak angkat untuk menerima warisan dari orang tau angkatnya, karena yang dapat saling mewarisi diantaranya adalah adanya hubungan nasab, padahal antara anak angkat dengan orangtua angkat tidak ada hubungan nasab, maka disini anak angkat hanya berhak mewarisi dari harta orang tau kandungnya sendiri.

## **J. Halangan Untuk Menerima Warisan**

Halangan untuk menerima warisan disebut dengan *mawani' al-irs*, adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta

---

<sup>82</sup> A. Hasan, *al-faraid*, Pusaka Progresif, Surabaya, 1981, hal 16

peninggalan al- muwaris. Hal-hal yang dapat menghalangi seseorang untuk menerima warisan adalah ;

1. pembunuhan (*al-qatl*)
2. berlainan agama (*ikhtilaf*)
3. perbudakan (*al-abd*)
4. berlainan negara (tidak disepakati para ulama') <sup>83</sup>

#### Ada 1). Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris kepada *al muwaris*, menyebabkannya tidak dapat mewarisi harta peninggalan yang diwarisinya.

#### Ada 2). Berlainan Agama

Berlainan agama yang menjadi penghalang untuk mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan *al-muwaris*, salah satunya beragama Islam dan yang lain tidak beragama islam.

Dasar hukumnya adalah hadist riwayat bukhori muslim, sebagai berikut :

“Orang islam tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim”. (Muttafaq’ alaih)

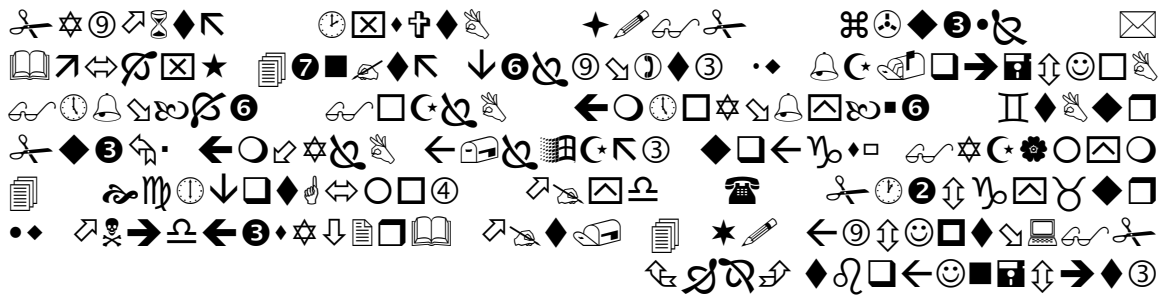
#### Ad 3).Perbudakan (al-abd)

Perbudakan menjadi penghalang untuk saling mewarisi bukan karena status kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak) Mayoritas ulama’ sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cukup melakukan perbuatan hukum. Sebagaimana firman allah dalam surat An-Nahl Ayat 75, yaitu :

---

<sup>83</sup> Ahmad Rofiq, *Op-cit*, hal, 30





Artinya ; Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui[833] <sup>84</sup>.

[833] Maksud dari perumpamaan ini ialah untuk membantah orang-orang musyrikin yang menyamakan Tuhan yang memberi rezki dengan berhala-berhala yang tidak berdaya.

#### Ad 4). Berlainan Negara

Berlainan Negara yang menjadi penghalang mewaris adalah apabila diantara muwaris dan ahli waris tersebut berdomisili pada dua Negara yang berbeda kriterianya. Apabila kedua Negara itu sama-sama Negara muslim, para ulama berpendapat tidak ada halangan untuk saling mewarisi.

<sup>84</sup> Q.S. An-Nahl Ayat (75)

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) Dan Akibat Hukumnya Dalam pembagian**

Dalam hukum Islam ( fiqh ) pengangkatan anak disebut dengan *tabanni*, yang artinya mengambil anak.

Para ulama' fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliyah, dalam arti terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orangtua kandungnya dan masuknya ia kedalam hukum kekerabatan orangtua angkatnya. Dalam alqur'an pengangkatan anak yang menghapus nasab disebut yaitu, menghubungkan asal usul anak kepada seseorang yang bukan ayah anak itu. Konsep ini adalah klaim yang tidak benar karena itu tegas dilarang oleh Islam.

Sebagaimana para ulama' fikih berpendapat mengenai anak angkat yaitu :

Menurut Wahbah Al-Zuhaidi sebagaimana dikutip Andi syamsu dan M.Fauzan dalam buku Hukum Pengangkatan Anak dalam perspektif Islam, "*Tabanni*" adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasab-nya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya.<sup>85</sup> Dalam pengertian lain *Tabanni* adalah seseorang laki-laki atau perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua

---

<sup>85</sup> Wahbah al-Zuhaidi, *al fiqh al-islami wa al- adilathu*, Juz 9, Bairut, Dar al Fikr al- Ma'ashir, hal 271

kandungnya.<sup>86</sup> Pengertian anak seperti demikian jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasab-nya harus dibatalkan.

Menurut ulama fikih Mahmud Saltut, beliau membedakan dua macam anak angkat, yaitu :

- (3) Pernyataan seseorang terhadap anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain kedalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri.
- (4) Pengertian yang dipahamkan dari perkataan “Tabanni” (mengangkat anak secara mutlak) menurut hukum adat dan tradisi yang berlaku pada manusia, yaitu memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain kedalam keluarganya yang tidak ada hubungan pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak yang sah kemudian ia mempunyai hak dan kewajiban sebagai anak<sup>87</sup>.

Dari definisi yang dikemukakan diatas barang kali menghantarkan penulis untuk lebih memahami istilah anak angkat ( adopsi ). Istilah anak angkat menurut pengertian pertama dari Mahmud Saltut adalah lebih tepat untuk Indonesia yang mayoritas beragama islam. Sebab disini tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan dalam segala kebutuhan, bukan diperlakukan seperti anak nasabnya sendiri.

Oleh karena itu anak angkat bukan sebagai anak pribadi menurut syari’at islam dan tidak ada ketetapan sedikitpun menurut syariat Islam kalau mengambil standar hukum Islam untuk membenarkannya. Sedangkan pengertian kedua menurut Mahmud Saltut tersebut sama persis menurut hukum barat yang arahnya lebih menekankan kepada memasukkan anak yang diketahui sebagai anak orang lain kedalam keluarganya dengan mendapat status dan fungsi yang sama dengan anak kandung. Pengertian kedua ini

---

<sup>86</sup> Muhammad Muhyi al-Din Abdul Hamid, *Al- Ahwal al- syahsiyah fi al-syariah al-islamiyah*, Mesir, Maktabah Muhammad Ali Shobih, 1966, hal 386

<sup>87</sup> Mahmud Saltut, *AlFatawa*, cet III, Kairo, Dar al Qalam, hal 321

memiliki konsekuensi sampai kepada hak mewarisi harta warisan orang tua angkatnya.

Hukum Islam hanya mengakui bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemeliharaan demi kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa adanya pemutusan hubungan nasab dengan orang kandungannya. Artinya meskipun dalam anak yang diangkat dipelihara, dididik, dibiayai keperluannya sehari-hari oleh orangtua angkat, tetapi anak tersebut dengan orang kandungannya masih tetap mempunyai hubungan hukum dengan segala akibatnya. Lembaga pengangkatan anak inilah yang dibenarkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah, kepedulian dan tanggungjawab sosial keluarga yang mampu secara ekonomi untuk memberikan bantuan kepada anak yang kurang beruntung. Dengan kata lain pengangkatan anak dalam hukum Islam adalah *khadhonah* yang diperluas dengan sama sekali tidak merubah hubungan hukum, nasab, mahrom, hijab antara orangtua angkatnya. Perubahan yang terjadi hanya perpindahan tanggungjawab pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan dari orangtua asal atau kandung kepada orang tua angkat.

Pengangkatan anak dalam hukum Islam merupakan *khadhonah* yang diperluas, arti *khadonah* menurut Ulama' fikih sebagai mana di kutip oleh Abu Bakar al- Jabir, memberikan arti *Khadonah* sebagai usaha memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohaninya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim.<sup>88</sup>

Sedangkan menurut zahabi adalah melayani anak kecil untuk mendidik dan memperbaiki kepribadiannya oleh orang-orang yang berhak mendidiknya pada usia tertentu, karena ia tidak sanggup melakukannya sendiri.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Abu Bakar Al- Jabir, *Minhajul Muslim*, Darul- Syuruq, hal 586

<sup>89</sup> Muhammad Husain Zahabi, *Al-syariah al- Islamiyah, Dirasah Muqaranah Baina mazahibah sunnah wa al mazha al ja'fariyah*, Dar al kutub al hadist, hal 398

Pengertian tersebut diatas sama dengan pengertian yang ada dalam fikih Indonesi ( KHI ) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 huruf (g) yaitu : Suatu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.<sup>90</sup>

Aspek hukum menasabkan kepada orang tua angkat dengan memutuskan nasab dengan orangtua kandungnya, sebagaimana dipraktekkan zaman jahiliyah dan beberapa kasus kontemporer, dikecam oleh Islam, karena bertentangan dengan ajaran agama Islam. Hadist yang berasal dari abu dzar dan diriwayatkan oleh bukhori muslim menjelaskan Rosulullah bersabda “ Tidak seorang mengaku bernasab kepada seorang yang ia ketahuinya bukan ayahnya, maka ia telah menjadi kafir ”. Dalam mengomentari hadist ini imam alusy mengatakan bahwa haram hukumnya orang yang dengan sengaja menasabkan dirinya sebagai anak seorang laki-laki yang bukan ayahnya. Tapi seseorang yang memanggil seseorang anak dengan panggilan dengan maksud untuk menunjukkan kasih sayang diperbolehkan . Alasan lain bahwa orang yang menyebut orang lain sebagai ayahnya adalah kafir. Menurut imam Ibn Hajar Asqalany, karena ia telah berbohong kepada allah, seolah-olah mengatakan bahwa ia diciptakan allah dari benih dari orang tersebut.

Dari hasil penelitian literatur diatas dapat diambil kesimpulan bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang diperlakukan sebagai anak sendiri dalam seegi kecintaan, kasihsayang, pemeliharaan, pendidikan dan tanggungjawab lainnya berdasarkan proses hukum yang sah dan tidak mengganggu status nasabnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum Islam ( alqur'an surat Al- Ahzab Ayat 4-5 ), yaitu :

---

<sup>90</sup> Kompilasi Hukum Islam, *Op.cit*, hal 84



Artinya : Allah tidak menjadikan bagi seorang dua buah hati dalam rongganya: Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamju zihar sebagai ibumu. dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu adalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang (benar). Pangillah mereka(anak-anak angkatmu itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pad sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (pangillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maulamu. Dan tidak ada atasmu terhadap apa yang kamu nkhilaf padanya, tetap (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu dan adalah allah maha pengampun lagi maha penyayang.<sup>91</sup>

Dari ayat al ahzab tersebut dapat diketahui garis hukumnya, yaitu :

5. Allah tidak menjadikan dua buah hati dalam dada manusia. Allah tidak akan menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri.
6. Anak angkat bukanlah anak kandungmu.
7. Panggilah anak angkatmu menurut nama bapaknya
8. Bekas istri anak angkat boleh kawin dengan anak angkat

<sup>91</sup> Q.S,Al-Ahzab Ayat 4-5

Sedangkan menurut menurut Pasal 171 huruf ( h ) Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) pengertian anak angkat dinyatakan dengan jelas bahwa anak angkat yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orangtua asal kepada orang tua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.<sup>92</sup>

Perumusan Pasal tersebut diatas dimaksudkan untuk :

- 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia
- 2) Menghilangkan perbedaan penapat tentang boleh tidaknya pengangkatan anak dalam hukum Islam dan juga pengertiannya tentang pengangkatan
- 3) Melembagakan secara hukum praktek pengangkatan anak
- 4) Memberikan arahan tentang praktek pengangkatan anak yang benar dan tepat.

Perumusan Pasal ini sepenuhnya mengacu pada pada praktek pengangkatan anak oleh rosulullah atas Zaid bin Haritsah dengan meningkatnya sebagai lembaga agar tercipta ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum dalam pengangkatan anak.

Adapun mengenai syarat-syarat pengangkatan anak ini tidak diatur dalam hukum Islam baik dalam ( alqur'an dan hadist ), maupun dalam Kompilasi Hukum Islam ( KHI )

Untuk dapat melakukan pengangkatan anak baik calon anak angkat maupun calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan agar pengangkatan anak tersebut menjadi sah dan berkekuatan hukum tetap. Syarat-syarat tersebut diatur dalam Surat Keputusan Menteri

---

<sup>92</sup> *Himpunan Perundang-undangan dalam lingkungan pengadilan Agama*, Dirbinbapera depag, 2001, hal 360

Sosial RI NO. 41 / HUK / KPE / VII / 1984, yaitu untuk mendapatkan izin pengangkatan anak adalah sebagai berikut :

1. Bagi calon orang tua angkat

- a. Berstatus kawin dan berumur minimal 25 tahun atau maksimal 45 tahun
- b. Selisih umur antara calon orang tua angkat dengan anak angkat minimal 20 tahun
- c. Pada saat mengajukan izin pengangkatan anak sekurang-kurangnya sudah kawin 5 tahun, dengan mengutamakan yang keadaannya sebagai berikut :
  - 1). Tidak mungkin mempunyai anak ( dengan surat-surat keterangan dokter kebidanan atau dokter ahli )
  - 2). Belum mempunyai anak atau,
  - 3). Mempunyai anak kandung seorang:
  - 4). Mempunyai anak angkat seorang dan tidak mempunyai anak kandung didalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang serendah-rendahnya lurah atau kepala desa setempat
- d. Berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan kepolisian Republik Indonesia
- e. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter Pemerintah
- f. Mengajukan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk kesejahteraan anak

2. Bagi calon anak angkat

- a. berumur kurang dari 5 ( lima ) tahun
- b. persetujuan tertulis dari pemerintah Negara asal calon anak angkat
- c. Berada dalam asuhan organisasi sosial



### 3. Laporan sosial

Laporan sosial dibuat oleh pekerja sosial atau pejabat yang ditunjuk dengan dibantu oleh organisasi meliputi :

#### a. calon orang tua angkat

- 1). Identitas
- 2). Keadaan kesehatan jasmani, lingkungan dan mental
- 3). Keadaan keluarga
- 4). Keadaan ekonomi keluarga
- 5). Hubungan sosial
- 6). Alasan dan tujuan pengangkatan anak
- 7). Kesimpulan dan rekomendasi

#### b. calon anak angkat

- 1). Identitas
- 2). Keadaan orang tua kandung / wali
- 3). Riwayat sampai di organisasi sosial
- 4). Pertumbuhan perkembangan selama di organisasi sosial

Adapun kelengkapan untuk permohonan pengangkatan anak harus dilampirkan sebagai berikut :

#### 1. Dari calon orang tua angkat

- a. akta perkawinan
- b. akta kelahiran
- c. Surat keterangan dan kesehatan jiwa
- d. Surat keterangan berkelakuan baik

e. Surat keterangan penghasilan

2. Dari calon anak angkat

Surat persetujuan dari :

- a. orang tua kandung ( dibuat akta notariil )
- b. Ibu kandung bila orang tua tidak kawin sah
- c. Mereka yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak

3. Dari pemerintah

Surat persetujuan dari Menteri Sosial bagi :

- a. calon orang tua angkat
- b. calon anak angkat

Mengenai syarat-syarat pengangkatan anak ini tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam ( KHI ), oleh karena itu hal ini kembali kepada ketentuan yang terkandung dalam ajaran syariat Islam dalam sumber hukum yang tertulis dengan syariat Islam, berdasarkan *masalah mursalah*, syarat-syarat pengangkatan anak dapat dirangkum sebagai berikut :

- a. Pengangkatan anak mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan keluarga ( Pasal 12 ( 1 ) UU No 4 Tahun 1979 ) hal ini artinya motivasi apapun yang mendorong untuk mengangkat anak harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak, apabila kepentingan dan kesejahteraan anak dirugikan, maka pengangkatan anak harus dicegah
- b. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya, apabila pengangkatan anak dimaksudkan memutuskan

hubungan darah atau nasab maka tidak diizinkan ( Penjelasan Pasal 12 Ayat ( 1 ) UU No 4 Tahun 1979 )

- c. Pengangkatan anak tidak memindahkan atau menimbulkan hubungan nasab antara anak dengan orang tua angkatnya dan keluarga orangtua angkatnya ( sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-ahzab Ayat ( 4-5 ),maka jika akibat hukumnya seperti itu maka batal demi hukum
- d. Pengangkatan anak dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan ( Penjelasan Pasal 12 ( 1 ) UU No. 4 Tahun 1979, pengangkatan anak bagi anak-anak islam harus dilakukan berdasarkan hukum islam dan oleh orang tua yang beragama islam.agama anak ditentukan menurut ayahnya atau lingkungannya ( Pasal 172 KHI )
- e. Orang tua angkat harus beragama islam ( QS An-Nisa' Ayat 144 ) selain orang islam tidak boleh mengangkat anak anak islam sebagaia anak angkat. Hal ini menjamin keselamatan agama dan keyakinan anak baik didunia maupun diakherat ( penjelasan MUI dalam suratnya nomor ( 1-335/ MUI/ VI/ 82 ) tanggal 18 sya'ban 1402 H/ 10 juni 1982 yang ditanda tangani oleh ketua umum KH. M. Syukri Gozali.
- f. Orang tua angkat harus orang yang mampu baik secara fisik mental maupun material untuk memikul tanggung jawab terhadap anak angkat
- g. Apabila orang tua anak masih ada, harus ada persetujuan dari mereka
- h. Adanya kepatutan untuk mengangkat anak, selisih usia anytara anak dan orangtua angkat memungkinkan, misalnya 20 tahun

- i. Orang tua harus orang yang telah dewasa, dan sudah berkeluarga, menurut *ijtihad* para hakim ( kira-kira minimal 25 tahun dan tidak boleh lebih dari 45 tahun)
- j. anak yang diangkat belum berusia 5 tahun

Ketentuan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim Pengadilan Agama mengenai pengangkatan anak. Pengangkatan anak adalah suatu tindakan hukum dan oleh karena itu tentu akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum pengangkatan anak tersebut menurut Hukum Islam sebagai berikut :

- e. beralihnya tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat baik mengenai biaya hidup sehari-hari, pendidikan, dan kasih sayang.
- f. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua biologis dan keluarga.
- g. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkatnya melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- h. Untuk melindungi hak-hak orang tua angkat dan anak angkat harus ada kepastian hukum yaitu dengan adanya wasiat wajibah ( Pasal 209 KHI )
- i. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali cuma sebagai tanda pengenal atau alamat.
- j. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> M.Ali Hasan , *Hukum warisan dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1981, hal 59

Apakah anak angkat berhak mewaris apa tidak, Dalam masalah ini, untuk dapat lebih mengetahui Apakah anak angkat berhak mewaris apa tidak, maka penulis akan membahas dalam dua bagian, yaitu :

1. Sebab-sebab seseorang berhak menerima dan seorang terhalang menerima warisan
2. Anak angkat dalam sistem kewarisan Islam

Ad 1 : sebab-sebab seseorang berhak menerima dan Rintangan seseorang menerima warisan

1.a. Sebab-sebab seseorang berhak menerima warisan

Dalam ketentuan hukum Islam, sebab-sebab untuk menerima warisan ada tiga ( 3 ), yaitu:

1). Hubungan kekerabatan ( *al-qarabah* )

Dalam ketentuan hukum jahiliyah, kekerabatan menjadi sebab mewarisi adalah terbatas pada laki-laki yang telah dewasa. Kaum perempuan dan anak-anak tidak mendapat bagian. Muhammad Ali Al Shabuni, dalam bukunya *al mawaris fi al syari'ah al -islamiyah fi Dhau'al-kitab wa al-sunnah* mengatakan “ Sungguh keberadaan kaum perempuan sebelum datang sinar terang islam, tidak diberi bagian warisan sama sekali, argumentasinya mereka tidak bisa dan tidak mampu berperang. Orang-orang arab mengatakan “bagaimana kami memberi bagian kepada orang yang tidak bisa mengendarai kuda, tidak bisa membawa pedang, dan tidak bisa memerangi musuh” Maka mereka menolak memberi mereka bagian warisan seperti halnya mereka menolak memberi bagian kepada anak-anak kecil”.<sup>94</sup>

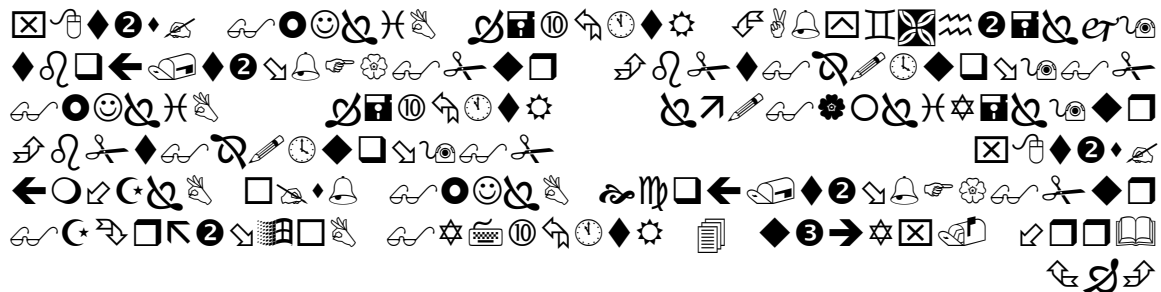
Islam datang untuk memperbarui dan merevisinya, kedudukan laki-laki dan perempuan termasuk didalamnya anak-anak, bahkan bayi yang masih didalam kandunganpun, mereka sama-sama diberi hak untuk dapat mewarisi, sepanjang hubungan kekerabatan jelas dan diperbolehkan. Artinya ada ketentuan bahwa kerabat yang dekat hubungannya, dapat menghalangi kerabat yang jauh. Adakalanya menghalangi

---

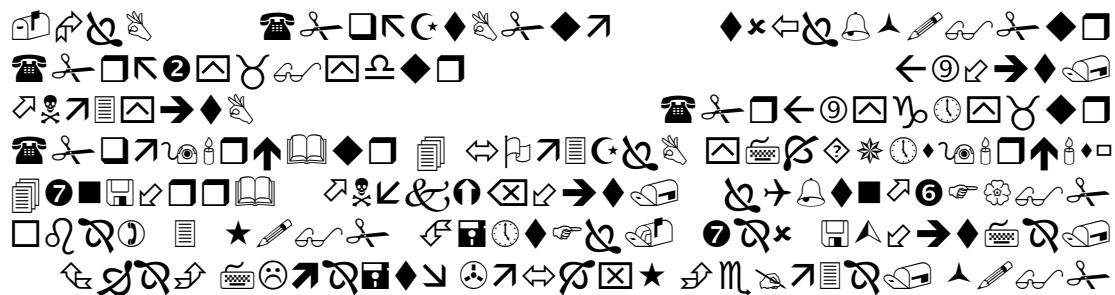
<sup>94</sup> Muhammad Ali al Shabuni, *al mawaris fi al syari'ah al -islamiyah fi Dhau'al-kitab wa al-sunnah*, Bairut, Alam al Kutub, 1399 h/ 1985 m, hal 19

(*menghijab*) secara keeluruhan, adakalanya menghalangi itu hanya sekedar mengurangi bagian ahli waris yang *terhijab*.

Dasar hukum kekerabatan sebagai ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan punya hak yang sama dalam mewaris adalah sebagaimana firman allah dalam surat Annisa' Ayat 7 dan surat Al- Anfal Ayat 75, yaitu :



Artinya : Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan <sup>95</sup>.



Artinya : Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)[626] di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu <sup>96</sup>.

<sup>95</sup> Q.S An-Nisa' Ayat (7)

<sup>96</sup> Q.S. An-Anfal Ayat (75)

[626] Maksudnya: yang Jadi dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara muhajirin dan anshar pada permulaan Islam.

2). Hubungan perkawinan atau semenda (*al- musabarah*)

Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi, baik menurut ketentuan hukum agama maupun ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan sangat diperlukan untuk membuktikan secara yuridis formal, bahwa dua orang telah melakukan perkawinan. Sehingga dengan pencatatan tersebut bisa diketahui apakah hubungan perkawinan masih berlaku, apabila salah satu pihak ada yang meninggal dunia. Demikian juga untuk membuktikan kekerabatan anak-anak dari perkawinan itu, sebab jika tidak ada bukti yang tertulis ahli waris yang jauh menyangkal bahwa perkawinan itu tidak pernah ada, karena ingin menguasai harta warisan si mati. Tentu hal ini sangat merugikan pihak-pihak yang sebenarnya lebih berhak untuk mendapatkan warisan.

Termasuk isteri dalam status perkawinan adalah ister-isteri yang diceraikan *raj'i*, yaitu cerai yang dalam hal ini suami lebih berhak untuk merujuknya ketimbang orang lain, yaitu cerai pertama atau kedua, selama dalam masa tunggu (*iddah*).<sup>97</sup>

3). Hubungan karena sebab memerdekakan budak atau hamba sahaya (*al- wala'*), atau karena perjanjian tolong menolong, namun yang terakhir ini kurang mashur.

*Al-wala'* adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong. *Al- wala'* yang pertama disebut *wala' al 'ataqab* atau '*ushubah ashoboiyah*, dan yang kedua disebut *wala' al mawalah*, yaitu

---

<sup>97</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris (edisi revisi)*, Jakarta, Raja Grafinso, 2001, hal. 45

*wala'* yang timbul akibat kesediaan seseorang untuk saling tolong menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian.

Sedangkan menurut A. Hasan, sebab-sebab orang mendapatkan harta pusaka itu ada tiga macam, sebagai berikut :

- a). nasab, ialah perhubungan keluarga diantara mereka,
- b). nikah, ialah perkawinan seseorang dapat harta pusaka karena menjadi suami-isteri.
- c). *Wala'* ialah hak mendapatkan harta pusaka karena memerdekakan hamba sahaya atau budak.<sup>98</sup>

Dari definisi diatas jelas bahwa hukum Islam ( Alqur'an dan Hadist), tidak memberikan hak bagi anak angkat untuk menerima warisan dari orang tua angkatnya, karena yang dapat saling mewarisi diantaranya adalah adanya hubungan nasab, padahal antara anak angkat dengan orangtua angkat tidak ada hubungan nasab, maka disini anak angkat hanya berhak mewarisi dari harta orang tua kandungnya sendiri.

#### 1.b. Rintangan Seseorang Menerima Warisan

Halangan untuk menerima warisan disebut dengan *mawani' al-irs*, adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan *al- muwaris*. Hal-hal yang dapat menghalangi seseorang untuk menerima warisan adalah <sup>99</sup>

##### 1). Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris kepada *al muwaris*, menyebabkannya tidak dapat mewarisi harta peninggalan yang diwarisinya.

---

<sup>98</sup> A. Hasan, *al-faraid*, Pusaka Progresif, Surabaya, 1981, hal 16

<sup>99</sup> Ahmad Rofiq, *Op.cit*, hal, 30



## 2). Berlainan Agama

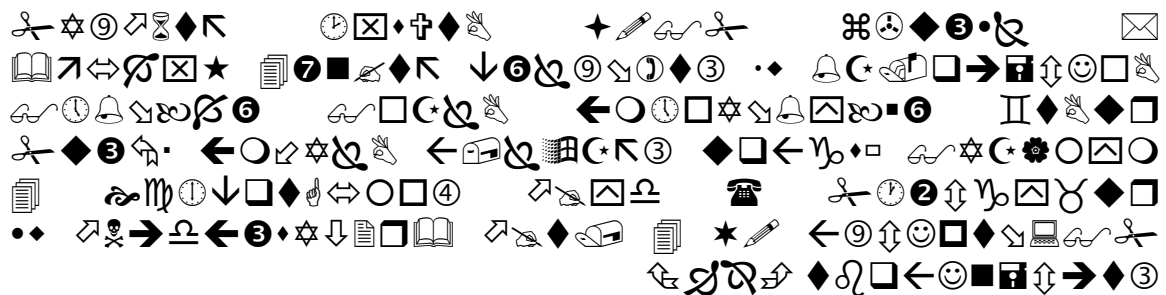
Berlainan agama yang menjadi penghalang untuk mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan *al-muwaris*, salah satunya beragama Islam dan yang lain tidak beragama Islam.

Dasar hukumnya adalah hadist riwayat bukhori muslim, sebagai berikut :

“Orang islam tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim”. ( Muttafaq’ alaih )

## 3). Perbudakan (*al-abd*)

Perbudakan menjadi penghalang untuk saling mewarisi bukan karena status kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya ( budak ) Mayoritas ulama’ sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cukup melakukan perbuatan hukum.<sup>100</sup> Sebagaimana firman allah dalam surat An-Nahl Ayat 75, yaitu :



Artinya : Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui[833].<sup>101</sup>

<sup>100</sup> Ahmad Rofiq, *Op.cit*, hal, 30

<sup>101</sup> An-Nahl Ayat 75

[833] Maksud dari perumpamaan ini ialah untuk membantah orang-orang musyrikin yang menyamakan Tuhan yang memberi rezki dengan berhala-berhala yang tidak berdaya.

#### 4). Berlainan Negara

Berlainan Negara yang menjadi penghalang mewaris adalah apabila diantara muwaris dan ahli waris tersebut berdomisili pada dua Negara yang berbeda kriterianya. Apabila kedua Negara itu sama-sama Negara muslim, para ulama berpendapat tidak ada halangan untuk mewarisinya.

#### 2) Anak Angkat dalam kewarisan Islam

Bagi kalangan orang muslim, pengangkatan anak telah diatur dalam surat al-Ahzab Ayat ( 4-5 ). Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf ( h ) menyatakan :” anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orangtua asal kepada orang tua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan.”<sup>102</sup>

Menurut ketentuan hukum Islam anak angkat tidak mewaris, kemudian nilai pihak anak angkat adalah sosok yang mempunyai pertalian hubungan kemanusiaan yang bersifat khusus dalam soal kedekatan dan saling membantu serta penempatan statusnya dalam keluarga orang tua angkatnya sebagaimana layaknya keluarga sendiri. Dengan demikian anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris, maka dengan sendirinya anak angkat tersebut tidak akan memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya yang telah meninggal terlebih dahulu. Oleh karena itu untuk melindungi hak-hak anak angkat dan orang tua angkat Kompilasi Hukum Islam memberi kepastian hukum berupa wasiat wajibah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 209 KHI Ayat ( 1 dan 2 ), yaitu :

---

<sup>102</sup> *Himpunan Perundang-undangan dalam lingkungan pengadilan Agama*, Dirbinbapera depag, 2001, hal 360

- (3) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya.
- (4) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orangtua angkatnya.<sup>103</sup>

Secara terminologi wasiat adalah:

هبة الانسان غيره عينا او دينا او منفعة على ان يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصى

Artinya : Pemberian seseorang kepada orang lain, berupa benda, utang, atau manfaat, agar si penerima memiliki pemberian itu setelah si pewasiat meninggal dunia.<sup>104</sup>

Sementara menurut Abd Al-Rahim dalam bukunya *al mubadarat fi al miras al-muqaran*, mendefinisikan wasiat adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda maupun manfaat secara sukarela atau tidak mengharapkan imbalan ( *tabarru* ) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat.<sup>105</sup>

Dari definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa wasiat adalah sebagai tindakan sukarela si pewasiat memberikan benda atau hak kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan (*tabarru*) yang pelaksanaannya setelah pewasiat meninggal dunia).

Mustafa Salabi dalam bukunya *Ahkam al-wasaya wa al auqaf* mengatakan sebagai berikut:

Kehadiran sistem wasiat dalam hukum Islam sangat penting artinya sebagai penangkal kericuhan dalam keluarga. Karena ada diantara anggota keluarga yang

<sup>103</sup> Abdurrahman, 1995, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademi Presindo, hal. 164

<sup>104</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal 183

<sup>105</sup> *Ibid*; hal 184-185

tidak berhak menerima harta peninggalan dengan jalan warisan. Padahal ia telah cukup berjasa dalam pengadaan barang itu, atau seorang cucu miskin terhalang oleh pamannya yang kaya, atau karena berbeda agama dan sebagainya, maka dengan adanya sistem wasiat yang diatur dalam hukum Islam, kekecewaan dapat diatasi.<sup>106</sup>

Ini berbeda dengan wasiat wajibah yaitu sebagai suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau lembaga yang mempunyai hak agar harta seseorang yang telah meninggal dunia, tetapi tidak melakukan wasiat secara suka rela, agar diambil hak atau benda peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula.

Tindakan pembebanan atau pemaksaan ini menurut Fatchur Rahmad dapat dibenarkan. Alasannya karena yang bersangkutan tidak memperhatikan anjuran syari'at. Dikatakan wasiat wajibah karena dua hal, yaitu:

4. Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui perundang-undangan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat.
5. Ada kemiripan dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.<sup>107</sup>

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir Nomor : 71 Tahun 1946, sebagaimana dikutip Fatchur Rahman menetapkan wajibnya pelaksanaan wasiat wajibah tanpa tergantung persetujuan ahli waris, kendatipun si mati tidak mewasiatkannya. Bahkan pelaksanaannya lebih didahulukan sebelum wasiat-wasiat yang lain ditunaikan sudah barang tentu dilakukan setelah kebutuhan jenazah dipenuhi dan pelunasan hutangnya si mati dibayarkan.

Sedangkan menurut Suparman Usman wasiat wajibah dapat didefinisikan sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kehendak

---

<sup>106</sup> Mustafa syalabi, *Ahkam al wasaya wa al-auqaf*, hal 13-14

<sup>107</sup> Fatchurohman, *Ilmu Waris*, Bandung, Al-Ma'arif, 1981, hal. 63

orang yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap dilaksanakan, baik diucapkan, dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh orang yang meninggal dunia jadi pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan, dituliskan, atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.<sup>108</sup>

Teoritis hukum islam ( klasik dan kontemporer ) berbeda pendapat dalam menetapkan hukum wasiat wajib, jumhur ulama berpendapat bahwa hukumnya hanya anjuran, bukan wajib dengan tujuan untuk membantu meringankan yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan hidup. Akan tetapi sebagian ulama' fikih lainnya, seperti Ibnu Hazm ( Tokoh madzab Az-Zahri ), Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at- Tabari( 225H / 839 / M - 310 H / 923M, mufassir) dan Abu Bakr bin Abdul Aziz ( tokoh fikih Madzab Hambali ) berpendapat bahwa wasiat seperti ini hukumnya wajib, dengan alasan surat Al-baqarah Ayat 180, menurut mereka perintah untuk berwasiat dalam ayat tersebut adalah untuk para ahli waris yang terhalang mendapatkan warisan.

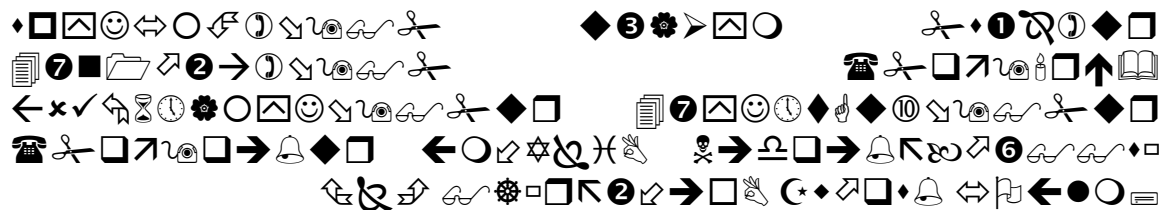
Wasiat wajibah pada dasarnya hanya diberikan kepada ahli waris yang tidak menerima bagian harta warisan karena terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat dengan pewaris, sebagai mana dimuat dalam UU No 17 Tahun 1946, yaitu: ” Apabila seorang meninggal dunia itu tidak mewasiatkan kepada keturunannya dari anak laki-laki yang telah mati diwaktu hidup atau mati bersamanya sekalipun secara hukum warisan dari harta peninggalannya seperti bagian yang harus diterima oleh anak laki-laki ini seandainya anak laki-laki ini hidup ayahnya mati, wajiblah ia berwasiat wajibah untuk keturunan dari anak laki-laki ini dalam batas maksimal 1/3 dari harta peninggalannya.

---

<sup>108</sup> Suparman Usman, *Fikih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Gaya media Pratama, 1991, hal 163

Ketentuan wasiat wajibah unsur-unsur positif yang berupa pemetaan dari harta warisan untuk keturunan pewaris. Demikian pula pemberian wasiat wajibah kepada anak angkatnya walaupun ia bukan keturunan bapak angkatnya.

Begitu pula pemberian wasiat wajibah kepada orang tua angkatnya yang telah berjasa membesarkan, mendidik sehingga ia berkembang menjadi dewasa dan mandiri. Hal ini sesuai dengan surat An- Nisa' Ayat 8 ;



Artinya : Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat[270], anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu [271] (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik<sup>109</sup>.

[270] Kerabat di sini Maksudnya : Kerabat yang tidak mempunyai hak warisan dari harta benda pusaka.

[271] Pemberian sekedarnya itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan.

Walaupun anak angkat itu tidak ada hubungan kerabat dengan orang tua angkatnya, tetapi ia mempunyai hubungan yang dekat dengan orang tua angkatnya yang telah dianggap sebagai keluarganya sendiri. Namun bagian 1/3 dari harta warisan untuk anak angkat atau orang tua angkat pada hakekatnya dianggap terlalu besar, karena bagian ini melebihi bagian ahli waris yang lebih dekat seperti seorang istri yang hanya memperoleh 1/4 jika tidak mempunyai anak, dan ibu yang hanya mendapatkan bagian 1/6, sehingga dalam kenyataan dimasyarakat anak angkat hanya mendapatkan bagian 1/8 atau 1/10 dari harta warisan.

---

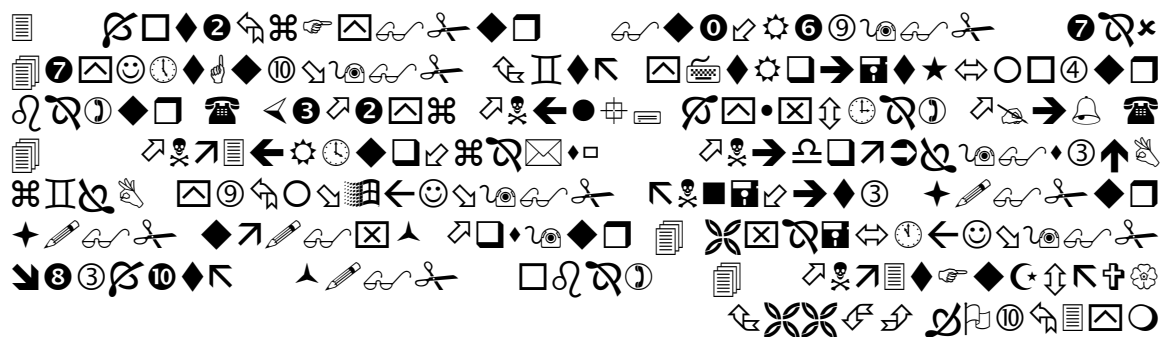
<sup>109</sup> Q.S An-Nia' Ayat (8)

Dengan didasarkan pada Ayat An-Nisa tersebut diatas, maka anak angkat dapat diberi bagian dari orang-orang yang meninggal menurut ukuran yang ma'ruf

Pemberian secara ma'ruf berarti suatu usaha untuk suatu kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan tujuan Allah menciptakan Syariat ( Undang-Undang ) yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan umum dan menghindarkan kemadharatan bagi umat.

*Maslahah mursalah* adalah memberikan hukum terhadap suatu kasus atas dasar kemaslahatan ( kebaikan ) yang secara khusus tidak tegas dinyatakan dalam nash, sedangkan jika dikerjakan jelas akan membawa kemaslahatan yang bersifat umum dan jika di tinggalkan jelas akan mengakibatkan kemafsadatan yang bersifat umum pula.<sup>110</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqoroh Ayat 220, yaitu :



Artinya ; Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: " Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana<sup>111</sup>.

Alternatif pemecahan masalah tentang bagian warisan bagi anak angkat ini kiranya tidak jauh dari ajaran Islam, karena apabila anak angkat tidak diberi bagian dari harta

<sup>110</sup> Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Jakarta, Raja Grafindo, 2000, hal 172

<sup>111</sup> Q.S Al-Baqoroh Ayat (220)

[illegible]

□◻▣○ ★✎✍✂ 7❌× ☎✂◻←⑨❌👤⌚▣ꝯ◆◻  
 ↗❏↗📖🕒◆=◆✎⇅ꝯ✍✂ ◆◻→♠ 📖 ⌚℘■ℳ⑩✍◻👤ꝯ  
 7❌× ↗◻↗↗📖☐0■▣◆↓ •✎◻→◻ꝯ ✍◆✎◆◻  
 ♡♂♂♂♂✂)✎ 📖 🕒●◆2◻○ ⇅Ⅱℳ✎ ♀×←ℳ♠⑨👤✍✂  
 ◆◻→♠ 📖 ℹ️⑩ℳ♠♠⌚◆2↗◻❌👤 ↗❏↗📖0❌◻📖

<sup>112</sup> Q.S Al-baqoroh Ayat (185)



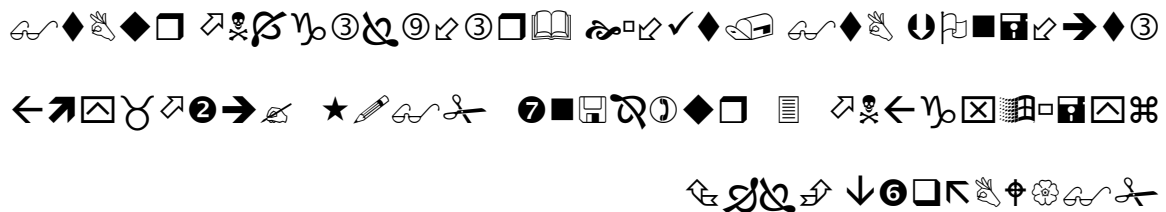


pengangkatan dapat dibenarkan oleh hukum Islam, Jika perbuatan tersebut akan membawa kemaslahatan bagi anak angkat disatu pihak dan orang tua angkat di pihak lain.

Hal ini sesuai dengan tujuan hukum Islam, yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindari *kemadharatan*. *Maslahat* dapat dijadikan sumber penetapan hukum apabila :

4. Adanya kesesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariah (*maqosidu al-syariah*)
5. Maslahat itu harus masuk akal, artinya bahwa maslahat mempunyai sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional jika diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
6. Penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi, dalam pengertian bahwa apabila maslahat diterima oleh akal tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hajj Ayat 76



76. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. dan Hanya kepada Allah dikembalikan semua urusan.<sup>114</sup>

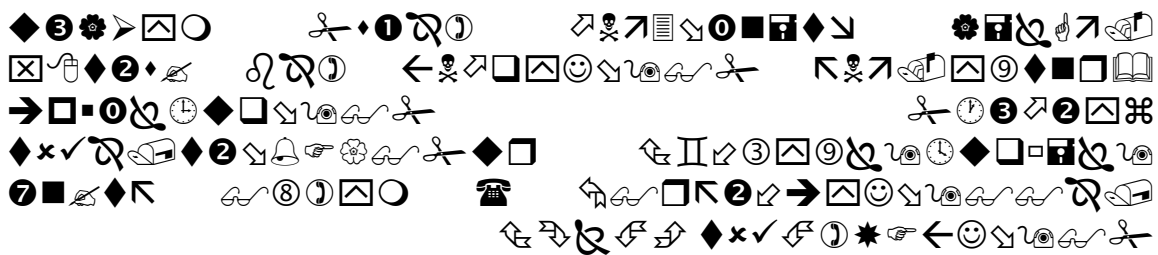
Dan Hadist Nabi SAW :

لا ضرر ولا ضرر

Artinya : Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan<sup>115</sup>

<sup>114</sup> QS. Al Hajj Ayat 76

Dalam hukum Islam ada perintah untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Anak angkat, dalam kaitannya dengan harta warisan orang tua angkatnya, secara hukum tidak berhak menerima bagian. Dalam keadaan demikian syariat Islam membuka pintu wasiat bagi orang tua angkat untuk memberikan hartanya sebagian guna kelanjutan pemeliharaan hidupnya. Bahkan menurut Imam Abu dawud dan para ulama' salaf bahwa wasiat hukumnya wajib. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 180, yaitu:



Artinya: “ Diwajibkan atas kamu, apabila orang diantara kamu kedatangan ( tanda-tanda ) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak hendaklah berwasiat kepada ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf. Ini adalah kewajiban bagi orang yang taqwa ” <sup>116</sup>

Maksudnya dengan pertimbangan kemaslahatan dan kebutuhan dari sebagian masyarakat Indonesia, maka wasiat wajibah untuk orang yang dianggap sebagai anak angkat boleh diberikannya.

Pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat yang tidak menerima bagian sedikitpun dari harta peninggalan orang tua angkatnya demikian pula sebaliknya orang tua angkat yang tidak menerima bagian sedikitpun dari harta peninggalannya dapat dibenarkan agar tidak terjadi kesulitan dikemudian hari.

<sup>115</sup> Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih ( cetakan ke II )*., Bandung, Kencana Prenada Media Group, hal 200

<sup>116</sup> Q.S. Al-Baqoroh (2) :180

## **B. PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK**

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentuk pada takdir ilahi, dimana keinginan untuk mempunyai anak tidak tercapai. Pada umumnya manusia tidak akan puas dengan apa yang dialaminya, sehingga berbagai upaya dilakukan untuk memenuhi keinginan tersebut. Dalam hal keinginan memiliki anak, usaha yang bisa mereka lakukan adalah dengan mengangkat anak ( adopsi ).

Pengangkatan anak disini merupakan alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga, karena “ Tujuan dari perkawinan yang dilakukan, pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan, yaitu anak. Begitu pentingnya hal keturunan ( anak ) ini, sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum, karena misalnya, ketiadaan keturunan ( anak ). Perceraian, poligami dan pengangkatan anak merupakan beberapa peristiwa hukum yang terjadi karena alasan di dalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan ( walaupun bukan satu-satunya alasan ). Tingginya frekuensi perceraian, poligami dan pengangkatan anak yang dilakukan didalam masyarakat mungkin merupakan akibat dari perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan, maka tujuan perkawinan itu tidak tercapai.”<sup>117</sup>.

Oleh karena itu, tujuan pengangkatan anak antara lain untuk meneruskan keturunan, manakala di dalam suatu perkawinan tidak dikaruniai anak. Hal ini merupakan salah satu jalan keluar dan alternatif positif serta manusiawi terhadap kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga. Akan tetapi perkembangan masyarakat sekarang menunjukkan bahwa tujuan pengangkatan anak tidak semata-mata atas motivasi untuk meneruskan keturunan saja, tetapi juga karena faktor politik, sosial budaya dan sebagainya<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> Soerjono Soekanto dan Soleman b. Takeko, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta; Rajawali, hal.275.

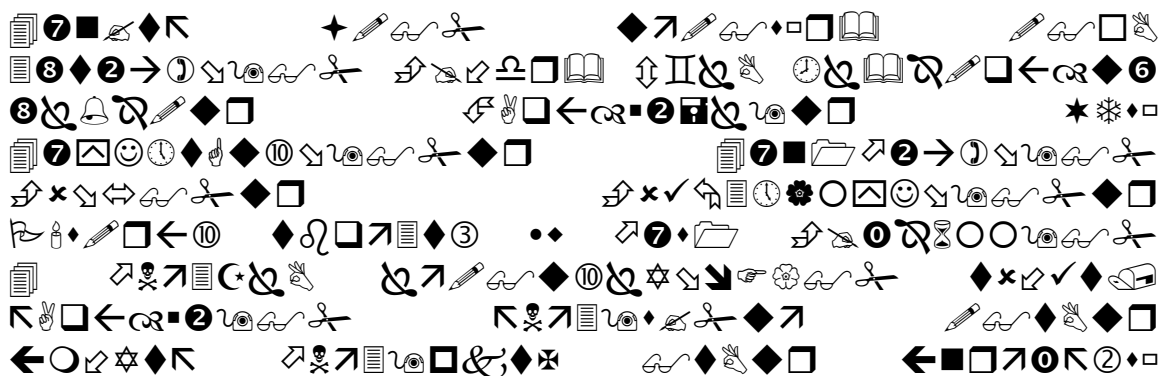
<sup>118</sup> Muderis Zaini, 1992, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistim Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet: 11, hal. 7-8.

Agama Islam mendorong umat Islam untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, dan terlantar. Tetapi tidak boleh memutuskan hubungan nasab, kedudukan anak angkat dan hak-hak dengan orangtua kandungnya, Pemeliharaan ini didasarkan pada penyantunan yang semata-mata demi kesejahteraan.<sup>119</sup>

Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak angkat yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orangtua asal kepada orang tua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.<sup>120</sup>

Pengambilan anak dalam pengertian yang tersebut di atas justru merupakan suatu amal yang baik yang dilakukan oleh sebagian orang yang mampu lagi baik hati, yang tidak dianugerahi anak oleh Allah. Mereka mematrikan dalam satu jenis pendekatan diri kepada Allah dengan mendidik anak-anak fakir miskin yang terbengkalai dari kecintaan ayahnya atau ketidakmampuan orang tuanya. Tidak diragukan lagi bahwa usaha-usaha yang dilakukan semacam ini merupakan suatu amal yang disukai, dipuji dan diberi pahala oleh Allah.<sup>121</sup>

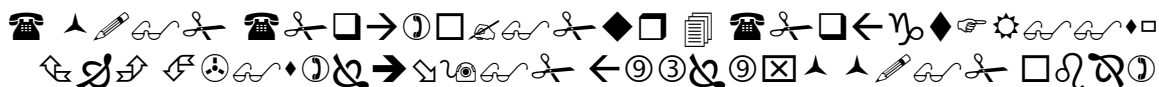
Hal ini sebenarnya merupakan misi keadilan sosial Islam, sebagaimana Islam membuka kesempatan kepada orang-orang yang kaya untuk mencapai amal melalui sedekah, sebagaimana firman Allah dalam surat AL-Hasr Ayat 7:



<sup>119</sup> Sayuti Thalib, SH, *Hukum keluarga Indonesia*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1974, hal 155

<sup>120</sup> *Himpunan Perundang-undangan dalam lingkungan pengadilan Agama*, Dirbinbapera depag, 2001, hal 360

<sup>121</sup> Fathurrahman, *ilmu Waris*, cet.2, Bandung, PT, Al- Ma'arif, 1981, hal.12



Artinya : Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya ( dari harta benda ) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya <sup>122</sup>

Islam menetapkan wajib hukumnya mengambil dan memelihara mereka ( anak-anak yang terlantar, miskin dan kurang mampu ), menjadi tanggung jawab masyarakat atau dapat dilaksanakan oleh beberapa orang dan membebaskan tugas dari masyarakat yang lain, secara fardu kifayah. Tetapi hukum ini menjadi fardhu ain, yaitu wajib bagi orang-orang yang menemukan anak yang terbuang di tempat yang mungkin dia akan binasa jika di tinggal begitu saja.<sup>123</sup> Karena sesungguhnya jiwa manusia berhak untuk dijaga dan dipelihara, dan ia tidak bertanggung jawab terhadap dosa yang dikerjakan oleh orang lain walaupun itu ibu bapaknya.

Didalam menyelesaikan perkara tersebut hakim dalam pertimbangannya tidak terlepas juga hal puncak tujuannya tidak lain hanyalah untuk kesejahteraan bagi anak yang diangkat itu sendiri, yang tentunya juga berdasarkan hukum Islam seperti misalnya kedudukan anak angkat tidak dimasukkan nasabnya kedalam orang tua angkatnya, sehingga tidak akan menjadi mahrom dan tidak akan memperoleh dan tidak akan saling

---

<sup>122</sup> Q.S. Al-Hasr Ayat (7)

<sup>123</sup> Zakaria Ahmad, *Ahkamul Al-aulad Fil Islam*, Kairo, Darul Qoumiyah, 1964, hal.24

mewarisi diantara mereka. Hanya diantara mereka akan menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan.<sup>124</sup>

Sementara menurut Bapak Rochmad, hakim Pengadilan Agama Kendal, selama di Pengadilan Agama untuk merealisasikan perkara yang sifatnya hampir sama dengan pengangkatan anak terhadap anak yang akan diasuh dan menjadi tanggung jawabnya, maka yang dipakai adalah hukum pengangkatan anak yang bersumber pada hukum Islam, yaitu dengan ketentuan bahwa pengangkatan tersebut adalah untuk kesejahteraan di anak dan untuk kemaslahatan semua pihak. dan tidak membawa akibat hukum mengenai nasab, wali mewali dan waris mewaris.

Jika ada seseorang yang mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak yang berakibat hukum putusannya nasab dengan orang tua kandungnya, wali mewali dan waris mewaris, maka permohonan tersebut akan dibatalkan, sebagaimana dalam kasus perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Bapak Fathurrohman bin Nadiman dan Farida binti Sofyan, yang bertempat tinggal di desa Karangayu RT. 02 RW. 03 Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, mereka bermaksud mengangkat anak angkat berkelamin perempuan bernama LAFI NUR JANNAH. Anak tersebut telah dirawat oleh mereka berdua selama 5 Tahun, dan anak tersebut adalah cucu kandungnya sendiri. Majelis Hakim membatalkan perkara permohonan tersebut karena motifasi Pemohon I dan II telah bertentangan dengan Syariat Islam, yaitu memutuskan nasab anak itu dengan orang tua kandungnya, karena Pemohon I dan II sengaja menyembunyikan identitas orang tua kandungnya, yang mana orang tua kandungnya adalah anaknya Pemohon I dan II yang sampai sekarang di panggil dianggap oleh LAFI NUR JANNAH adalah sebagai kakak kandungnya, dan Sepengetahuan LAFI NUR JANNAH Pemohon I dan II adalah

---

<sup>124</sup> Hasil wawancara dengan bapak Rochmad, Tanggal 1 maret 2010

ayah kandungnya, yang mana seharusnya pemohon I dan II adalah kakek dan neneknya Hal ini terjadi karena orang tua kandung LAFI NUR JANNAH malu, karena LAFI NUR JANNAH adalah anak Zina, meskipun akhirnya orang tuanya telah menikah juga dan bercerai. Penolakan tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa :

- 1). Pemohon I dan II memutuskan Hubungan Nasab antara anak angkat tersebut dengan orang tua kandungnya.
- 2). Merusak silsilah yang ada
- 3). Bertentangan dengan syariat Islam
- 4). Anak angkat tersebut akan mewaris melalui hak wasiat wajibah, padahal seharusnya dia terhibat dengan ibunya (anak kandung Pemohon I dan II)
- 5). Anak angkat tersebut akan kesulitan jikalau ia menikah ingin menikah<sup>125</sup>.

Hal tersebut diatas berbeda dengan permohonan perkara permohonan Pengangkatan anak, seperti contoh kasus Bapak M. Nur Rochim bin Paiman dan Uswatun Khasanah binti Muhadi yang bertempat tinggal didesa Kumpulrejo Rt.04 Rw.01 Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon, kabupaten Kendal yang dengan kerelaan hati menyerahkan anaknya yang baru berumur beberapa bulan ( masih bayi ) berkelamin perempuan untuk diasuh dan dirawat oleh Bapak Kaswadi bin Sutari dan Ibu Siti Rochmah binti Sukar yang telah 26 tahun berumah tangga, namun belum dikaruniai anak dan mereka sangat merindukan kehadiran anak dalam rumahtangganya. Kedua orang tua kandung tersebut bersedia menyerahkan anaknya karena mereka tidak mampu terutama secara ekonomi untuk merawat, membesarkannya dan mendidiknya dan bahkan ibu anak tersebut sedang sakit ( stres ) yang tidak mungkin dapat merawat anaknya tersebut. Hal ini mereka lakukan

---

<sup>125</sup> Hasil wawancara dengan bapak M. Kasthori, Hakim Pengadilan Agama Kendal Pada Tanggal 226 Februari 2010.



semata-mata untuk kesejahteraan si anak, karena Kaswadi bin Sutari dan Siti Rochmah binti Sukar tergolong orang baik dan dapat bertanggung jawab serta berprestasi cukup untuk dapat merawat, membesarkan dan mendidik anak tersebut.<sup>126</sup> Permohonan ini dikabulkan oleh majelis Hakim karena Pemohon I dan II tidak membawa akibat hukum yang dilarang oleh syariat Islam, yang mana ia tetap tidak memutuskan hubungan nasab antara anak angkat tersebut dengan orang tua kandungnya dan tujuan pengangkatan Pemohon I dan II benar-benar karena untuk kesejahteraan si anak dan menolong orangtua asal yang tidak mampu mengasuh anak tersebut karena sedang sakit ( stress ) dan kurang mampu membiayai kehidupan dan biaya pendidikannya si anak kelak karena orangtua asal tersebut tergolong orang yang kurang mampu dibidang ekonomi.

Untuk memperoleh kepastian hukum dan pencatatan administratif dalam kepegawaiannya yang bersangkutan mengajukan permohonan perwalian kepada Pengadilan Agama berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang dapat mengabulkan permohonan perwalian anak tersebut.

Seperti halnya pertimbangan hukum yang diterapkan hakim Pengadilan Agama yang terdapat dalam contoh penetapan pengangkatan anak yang terdapat dalam Pengadilan Agama Kendal

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kendal yang berbentuk penetapan yaitu penetapan No. 011 / Pdt. P / 2009/ PA.Kdl

Pengadilan Agama Kendal telah menerima perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh :-----

1. Kaswadi bin Sutari, umur 46 Tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di dusun Kalirandugede Rt. 05 Rw. 02, Desa Kalirandugede kecamatan

---

<sup>126</sup> Hasil wawancara dengan bapak Rohmad, Hakim pengadilan Agama Kendal tanggal 1 Maret 2010

Cepiring, kabupaten Kendal, selanjutnya disebut Pemohon I; -----

-----

2. Siti Rochmah binti Sukar, umur 43 tahun, agama Islam pekerjaan petani bertempat tinggal di dusun Kalirandugede Rt. 05 Rw. 02, Desa Kalirandugede kecamatan cepiring, kabupaten Kendal, selanjutnya ddisebut Pemohon II;-----

-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membacakan surat-surat dalam perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan pemohon I dan II sertya saksi-saksi dimuka sidang;

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2009, telah mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Agama Kendal, dan selanjutnya telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut dibawah register perkara nomor : 011/Pdt.P/2009/PA Kdl Tanggal 8 Juni 2009, pada pokonya mendalilkan hal-hal sebagai berikut: -----

Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II tanggal 5 Juni 1983 dihadapan Pegawai pencatat nikah Kantor urusan agama kecamatan Cepiring , dan sebagaimana ternyata dalam buku kutipan akta nikah Nomor 231/15/VI/ 83 Tanggal 5 Juni 1983

- i. Bahwa dalm perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang belum dikaruniai anak ( keturunan) -----
- Bahwa pemohon II pernah mengandung, namun pada saat usia kandungan 3 bulan mengalami keguguran, dan selanjutnya telah berobat baik secara medis maupun

melalui pengobatan alternatif, tetapi hingga sekarang belum juga dikaruniai anak ( keturunan ) -----

- ii. Bahwa Pemohon I dan II sangat mengharapkan adanya anak untuk melengkapi kebahagiaan dalam rumah tangga serta ingin turut mensejahterakan anak terutama anak dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi -----  
-----

- iii. Bahwa sepasang suami isteri bernama M.Nur Rochim bin Paiman, umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan buruh, dan Uswatun Khasanah binti Muhadi ,umur 31 tahun,agama Islam, pekerjaan buruh, keduanya tinggal di Kumpul rejo, Rt 04, Rw 01 desa Kumpulrejo kecamatan Patebon, kabupaten Kendal, yang dengan kerelaan hati bermaksud menyerahkan anaknya yang hanya berumur beberapa bulan ( masih bayi ) berkelamin perempuan untuk diasuh dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II karena kedua orang tua kandung tersebut tidak ada kemampuan secara ekonomi, bahkan ibu anak tersebut sedang sakit yang menyebabkan tidak dapat merawat anaknya.-----

- iv. Bahwa setelah mendengar penjelasan suami isteri tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memutuskan dapat menerima penyerahan anak perempuan yang masih bayi tersebut untuk dijadikan sebagai anak angkat dan pemohon I dan pemohon II berniat untuk merawat, mengasuh dan mendidiknya secara baik dan tanggungjawab terhadap anak bernama Hidayatu Nikmah lahir tanggal 9 agustus 2004, -----  
-----

- v. Bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan II menerima penyerahan anak bayi perempuan tersebut didasarkan kepada:-----

- a. Bahwa Pemohon I dan II sudah sangat merindukan kehadiran anak karena sudah 26 tahun berumah tangga belum dikaruniai anak
  - b. Bahwa Pemohon I dan II berpenghasilan cukup dan ingin meringankan beban ekonomi orang tua kandung anak tersebut serta ingin menyejahterakan anak tersebut.
  - c. Bahwa Pemohon I dan II ingin anak tersebut tumbuh dan berkembang jasmani dan rohaninya dengan baik, sebagaimana layaknya anak-anak yang lainnya
- Bahwa untuk kepentingan administratif dan kepastian hukum tentang kedudukan anak tersebut, maka Pemohon I dan II bermaksud menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat yang sah menurut hukum bagi Pemohon I dan II.
  - Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana uraian diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :-----
  - Primair :
    1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II
    2. Menetapkan anak bernama Hidayatu Nikmah binti M.Nur Rochim secara sah menurut hukum sebagai anak angkat pemohon I dan II
    3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum
  - Subsidair
  - Mohon penetapan yang seadil-adilnya.-----

- Menimbang bahwa dalam persidangan pemohon I dan II telah hadir dan menyatakan meneruskan permohonannya, kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan II tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, -----

- Menimbang Bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan dari orang tua kandung anak yaitu bernama Hayatu Nikmah bin M. Nur Rochim bin Paiman dan Uswatun Khasanah binti Muhadi dan keduanya mengaku telah kenal baik dengan Pemohon I dan II serta menyatakan anak yng diberi nama Hidayatu Nikmah adalah anak kandungnya yang ketiga. Keduanya juga menyatakan bahwa dirinya termasuk keluarga yang kurang mampu dan untuk mensejahterkan anak serta serta hubungan silaturahmi yang semakin kuat, keduanya secar tulus ihlas menyerahkan anak yang baru lahir tersebut untuk dijadikan anak angkat bagi Pemohon I dan II, -----

- Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan II No.231/15/VI/83 tanggal 5 juni 1983, diberi tanda P-1
2. Surat pernyataan dari M. Nur Rochim dan Uswatun Khasanah, Tertanggal 25 Mei 2009, diberi tanda P-2
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah M. Nur Rochim dan Uswatun Khasanah, No. 032/ 32/ IV/ 98 tanggal 15 april 1998, diberi tanda P-3
4. Surat keterangan penghasilan pemohon I yang dikeluarkan oleh kepala Desa Kalirandu gede tertanggal 12 juni 2009, diberi tanda P-4

- Bukti surat-surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan materai cukup, dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah:-----

- Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon I dan II juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. SUDIONO bin SUMADI , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, tinggal didusun Kalirandugede Rt.03 Rw 03, Desa Kalirandugede, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal.

- Bahwa saksi tersebut setelah bersumpah menurut agama Islam, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan II; -----

- Bahwa saksi kenal juga dengan M. Nur Rochim dan Uswatun Khasanah, keduanya adalah suami isteri dan mempunyai 4 orang anak, diantaranya adalah Hidayatu Nikmah,--  
-----

- Bahwa anak yang ketiga bernama Hidayatu Nikmah, oleh orang tuanya tersebut sejak umur 3 bulan telah diserahkan kepada Pemohon I dan II untuk dijadikan sebagai anak angkat karena ketika itu ibu anak tersebut sedang sakit stres sehingga tidak dapat merawat anak,-----

- Bahwa benar Pemohon I dan II selaku suami isteri, belum mempunyai anak ( keturunan ) meskipun sudah 26 tahun berumah tangga; -----

- Bahwa Pemohon I dan II orang yang abai dalam masyarakat dan secara sosial ekonomi mampu untuk mengurus anak sehingga tidak ada kekhawatiran Dalam hal kesejahteraan anak jika Pemohon I dan II mengangkat anak ; -----

- Bahwa Pemohon I dan II dikenal sebagai orang yang jujur dan bertanggung jawab dan berprestasi cukup sehingga tidak ada kekhawatiran jika mengangkat anak; -----

- Bahwa anak yang bernama Hidayatun Nikmah selama diasuh oleh Pemohon I dan II sehat wal'afiat dan hingga sekarang anak tersebut tumbuh dengan baik dan cerdas; -----

2. NASIKHUN bin AS'ARI, UMUR 45 Tahun , agama Islam pekerjaan petani, tinggal di Kalirandu gedé Rt.07 Rw. 01, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal

- Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan II ; -----

- Bahwa Pemohon I dan II sebagai suami isteri sah, dan hingga sekarang belum dikaruniai anak ( keturunan ); -----

- Bahwa Pemohon I dan II sudah berumah Tangga selama 26 tahun dan sering mengatakan kepada saksi kalau dalam keluarganya sangat merindukan anak-----

- Bahwa saksi kenal dengan M.Nur Rochim dan Uswatuin Khasanah, keduanya sebagai suami isteri dan mempunyai 4 orang anak, anaknya yang ketiga bernama Hidayatun Nikmah; -----

- Bahwa dalam keadaan ekonomi yang sulit ( pas-pasan ), atas kemauan dan didorong untuk kesejahteraan anaknya, M.Nur Rochim menyerahkan anaknya yang bernama Hidayatun Nikmah kepada Pemohon I dan II untuk dijadikan sebagai anak angkatnya; ---

- Bahwa Pemohon I dan II berpenghasilan cukup dan tidak diragukan tanggungjawabnya dalam keluarga; -----

- Bahwa anak yang bernama Hidayatu Nikmah selama diasuh oleh Pemohon I dan II hingga sekarang ini telah tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas, dan Pemohon I dan II sangat menyayangi anak tersebut, -----

- Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon I dan II menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan dan akhirnya mohon penetapan;

- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal ihwal sebagai mana tercatat dalam berita acara sidang; -----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan II adalah sebagai mana terurai diatas ; -----

- Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan keterangan Pemohon I dan II sebagaimana dalam bukti P-1 dan P-2 telah terbukti bahwa Pemohon I dan II adalah suami isteri yang sah dan telah berumah tangga selama 26 Tahun belum dikaruniai anak ( keturunan ), -----

- Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon I dan II dalam perkara ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan kemudahan ---

- Urusan administratif dalam pergaulan kemasyarakatan, sehingga Pemohon I dan II mohon ditetapkan anak bernama Hidayatu Nikmah bin M. Nur Rochim adalah sah menurut hukum Islam sebagai anak angkat Pemohon I dan II: -----

- Menimbang bahwa sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana dimaksud Pasal 171 huruf (h), Kompilasi Hukum Islam dirumuskan bahwa anak angkat adalah anak yang



pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. -----

- Menimbang bahwa yang dimaksud dengan putusan Pengadilan tersebut adalah putusan atau penetapan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, karena Pengadilan Agama adalah badan Peradilan Agama yang bertugas memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu berdasarkan hukum Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shodaqoh serta ekonomi syariah sedangkan dalam bidang perkawinana antara lain mengenai pengangkatan anak berdasar hukum Islam (vide Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006). -----

-----

- Menimbang bahwa tentang pengangkatan anak telah dikenal dalam hukum Islam sejak zaman Rosulullah Saw dan bahkan rosulullah sendiri telah mempraktekannya yaitu mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak angkatnya. -----

-----

- Oleh umat Islam di Indonesia pada umumnya dilakukan secara adat kebiasaan setempat ( dengan upacara-upacara yang berlaku setempat ) dan dilaksanakan secara diam-diam dari arti tanpa adanya putusan pengadilan, padahal dalam pergaulan sosial kemasyarakatan dan demi adanya kepastian hukum tentang status anak angkat sangat diperlukan adanya bukti tertulis yang dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam; -----

- Menimbang, bahwa selain itu mengenai pengangkatan anak telah diatur pula dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 jo Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang

perlindungan anak dan dimaksudkan untuk kepentingan kesejahteraan anak dan pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua asal keluarganya serta dilakukan menurut hukum yang berlaku bagi si anak; ----

-----  
- Bahwa anak bernama Hidayatu Nikmah adalah dari keluarga yang beragama Islam, sedangkan Pemohon satu I dan II juga beragama Islam, maka permohonan pengangkatan anak tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia;-----

- Menimbang, bahwa selanjutnya majlis hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan II tentang pengangkatan anak tersebut dihubungkan dengan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di republik indonesia; -----

-----  
- Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada ketentuan Hukum Islam yang bersumber Al-qur'an dan Alhadist maupun yang telah terhimpun dalam kompilasi hukum islam yang berlaku berdasarkan Inpres No.1 Tahun 1991, serta UU No 23 Tahun 2002 jo Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, dapat disimpulkan tentang prinsip-prinsip pengangkatan anak sebagai berikut :

1. Pengangkatan anak diperbolehkan dengan tujuan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak dan sangat dianjurkan terhadap anak-anak yang terlantar;
2. Dalam pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua asal, wali atau orang atau badan yang menguasai anak yang akan diangkat dengan calon orangtua angkat:
3. Dalam penmgangkatan anak harus menghormati hukum yang berlaku bagi si anak;

4. Pengangkatan anak yang beragama islam dan ahmay dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam ;
5. Dalam pengangkatan anak tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari baik pendidikan atau lainnya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat;
6. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab atau darah antara anak dengan orang tua asal keluarganya ;
7. Pengangkatan anak tidak menimbulkan nasab, kewarisan dan hubungan hukum lainnya antara anak angkat dengan orang tua angkat kecuali dalam hal tanggung jawab dan penguasaan anak ( perwalian);
8. Anak angkat berhak mendapatkan wasiat maksimal  $\frac{1}{3}$  dari seluruh harta orang tua angkatnya, begitu juga sebaliknya dan jika tidak ada wasiat sewaktu hidupnya dapat diberikan wasiat wajibah;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan II dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa : -----

1. Pengangkatan anak bernama Hidayatu Nikmah adalah atas dasar persetujuan antara orang tua asal dari anak tersebut dengan Pemohon I dan II, dimaksudkan serta kedua belah pihak menyadari nasab anak tetap dinasabkan kepada orang tua asal;
2. Bahwa orang tua asal si anak angkat adalah orang yang tidak mampu secara sosial dan ekonomi sedangkan Pemohon I dan II adalah suami steri yang baik, rukun dalam rumah tangga, kuat agamanya, dan mempunyai penghasilan yang cukup ( bukti P-4 );

3. Bahwa telah ternyata sejak anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan perawatan Pemohon I dan II yaitu sejak berumur selkitar 3 bulan hingga sekarang telah berumur sekitar 5 tahun tetap dalam keadaan sehat wal'afiat, tumbuh secara baik jasmani dan rohaninya dan orang tua asal tidak pernah ada keinginan untuk mengambil anak tersebut;
4. Bahwa Pemohon I dan II keduanya sebagai orang yang baik dan bertanggung jawab dalam masyarakat, sehingga patut diduga mereka akan tetap taat hukum terutama yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum pengangkatan anak sebagaimana terurai diatas ;

- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan II untuk mengangkat anak bernama Hidayatu Nikmah telah sesuai dengan hukum islam dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di indonesia, dan karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

- Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2006, maka seluruh biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon I dan II; -----

- Mengingat segala perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

-----MENETAPKAN-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II
2. Menetapkan, sah menurut hukum anak yang bernama Hidayatu Nikmah binti M. Nur Rochim sebagai anak angkat PEMOHON I dan II

3. Membebaskan kepada PEMOHON I dan II, untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 241.000, ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah )

Demikian penetapan ini dijatuhkan dikendal pada hari rabu duapuluh dua juli tahun dua ribu delapan masehi, bertepatan tanggal dua puluh sembilan rajab tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh hijriah, oleh Kami, Drs Yusuf Bukhori, SH, MSI, sebagai hakim ketua majelis, H.Khoirozi, SH, Drs. Rochmat, MH, Masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan itu dibacakan pada hari itu juga oleh hakim ketua tersebut dalam siding terbuka untuk umum dan dibantu oleh Thohir, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan II

Majelis Hakim dalam perkara ini telah mengabulkan permohonan Pemohon karena tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun hukum positif. Dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut berdasarkan *maslahah mursalah*. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum Islam, yaitu untuk merealisasikan dan menghindarkan *kemadharatan*. *Maslahat* dapat dijadikan sumber penetapan hukum apabila :

- 1). Adanya kesesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariah (*maqosidu al-syariah*)
- 2). Maslahat itu harus masuk akal, artinya bahwa *maslahat* mempunyai sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional jika diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.

3). Penggunaan dalil *maslahat* ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi, dalam pengertian bahwa apabila maslahat diterima oleh akal tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.

Oleh karena itu penulis dalam hal ini penulis berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh majelis hakim telah tepat dan benar, karena tidak bertentangan dengan syariat Islam

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

##### **1. Kedudukan Anak angkat menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam serta akibat hukumnya dalam pembagian waris.**

Kedudukan Anak angkat menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) adalah anak yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orangtua asal kepada orang tua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Pengadilan Agama Kendal tidak membawa akibat hukum dalam hal ada hubungan nasab, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkatnya atau sebaliknya, maka hal ini telah sesuai ketentuan syariat Islam. Anak angkat dalam KHI Pasal 209 di tempatkan bukan sebagai ahli waris, tetapi memperoleh warisan melalui jalan wasiat wajibah dengan ketentuan tidak boleh melebihi  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan, namun dalam kenyataannya bagian  $\frac{1}{3}$  ini terhitung terlalu besar, jadi dalam kenyataan anak angkat atau orang tua angkat hanya mendapatkan bagian  $\frac{1}{10}$  sampai  $\frac{1}{8}$ , karena bagian  $\frac{1}{3}$  tersebut melebihi bagian para ahli yang hubungannya lebih dekat atau lebih berhak, seperti isteri yang hanya memperoleh bagian  $\frac{1}{4}$  dari harta warisan jika tidak mempunyai anak, dan seorang ibu yang hanya memperoleh  $\frac{1}{6}$  dari harta warisan

##### **2. Pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh Hakim Pengadilan Agama dalam perkara permohonan penetapan anak.**

Pertimbangan- pertimbangan hukum yang dipergunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam perkara permohonan penetapan pengangkatan anak No. 011 / Pdt.P / 2009 / PA Kdl didasarkan pada masalah mursalah yaitu untuk kesejahteraan si anak, pelengkap kebahagiaan para orang tua angkat yang tidak dikarunia anak dan untuk membantu para orang tua asal yang kurang mampu mengasuh, mendidik dan memelihara anak kandungnya tersebut. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan menggunakan *masalah mursalah*, yaitu :

- a) Adanya kesesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariah (*maqosidu al-syariah*),
- b) Maslahat itu harus masuk akal, maslahat mempunyai sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional jika diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
- c) Dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi. dalam pengertian bahwa apabila maslahat diterima oleh akal tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.

## **B. SARAN**

1. Supaya para pakar Hukum Islam senantiasa berijtihad atas hukum yang hidup dan berkembang dimasyarakat terutama di bidang hukum pengangkatan anak supaya dapat dijadikan pedoman. Dan setelah adanya ketentuan Kompilasi Hukum Islam terutama Pasal 209 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) supaya dapat dijadikan pedoman oleh para hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara pengangkatan anak, sehingga adanya kepastian hukum.



2. Supaya masyarakat yang mampu secara sosial dan ekonomi, serta mampu mengemban amanah untuk tergerak hatinya membantu anak-anak yang miskin, terlantar dan kurang mampu yang sangat membutuhkan bantuan, kasih sayang dan belas kasihan dengan jalan mengangkat anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasan, 1981, *Al Faraid*, Pustaka Progresif, Surabaya
- Azizy, a. qodry, , 2002, *Eklektisisme Hukum Nasional*, Gama Media, Yogyakarta
- Abdulmanan, 1998, *Beberapa masalah hukum hutang wasiat*, dalam mimbar hukum w 301, Ditbinbapera Islam, Jakarta
- Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademi Presindo, Jakarta  
-----, 1995, *Kompilasi Hukum Islam*, Akademi Presindo, Jakarta
- Abdurrauf, 1970, *Al Qur'an dan Ilmu Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1970
- Abu Zahroh, Muhammad, 2002, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Imron AM, Pustaka Firdaus, Jakarta
- Abbas, 1983, Sirojudin, *Sejarah dan keagungan Madzab Syafi'I*, Pustaka Tarbiyah, Jakarta
- Abdul Aziz Almulabari, bin Zainudin, *Terjemahan Fath al Muin*, Toha Putra, Semarang
- Afdhol, , 2006, *Kewenangan Peradilan Agama berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 dan nlegalisasi hukum Islam Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya
- Ahmad Mustafa, 1968, *Al Maraghi*, Tafsir Al Maraghi, Bairut, Dar al-Fikri
- Ahmad AlBarri, 1964, *Ahkam al Aulad Fil Islam*, Kairo, Dar Al Qoumiyah
- Alam, Andi Syamsu, 2007, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta, Kencana
- Al Khudhori Biek, Ahmad, *Ushul Fiqh*, alih bahasa zaid H.Al Hamidi, Raja Murah, Pekalongan, 1982
- Ali Asshobuni, Muhammad, 1995, *Pembagian waris menurut Hukum Islam*, alih bahasa Basalamah, Gema Insani Press, Jakarta
- , 1994, *Hukum WAaris dalam Syariat islam*, C.V. Diponegoro, Bandung
- , 1994, *Tafsir Ayat-ayat hukum dalam al qur'an*, terjemahan Saleh Mahfud,, Al Maarif, Bandung

- Ali, Atabik, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yayasan Ali Maksum, Yogyakarta, 1998
- Al Jaziti, Muhammad, *Al fiqhu Mazahibul Arbaah*, juz IV, Maktobah Al tijariah Alkubro, Mesir, Tanpa Tahun.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Ashshofa, Burhan, 2000, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Al Qurtubi, 1978, *Al Jami' li Ahkamil Qur'an*, juz XIII-XIX, Bairut, Dar Al Fikr
- Al-Syarbani, *Al Muftaj al Mugni*, juz 3. Dar Al Fikri, Bairut, Libanon, Tanpa tahun
- Al Zuhaiy, 1989, *Al fiqh al islam wa adilatuh*, juz VIII, Darul Al Fikr, Damsyiq, cet III
- Ash Shiddieqy 1978, *Fiqhul Mawaris*, Bulan Bintang, Jakarta
- Arifin, Bustanul, 1985, *Pemahaman Hukum Islam dalam Konteks Perundang-undangan wahyu no. 108 th VII mei 1985*
- , 1994, *Prospek hukum Islam dalam kerangka pembangunan hukum Nasional Indonesia*, Ikatei Peradilan Agama, Jakarta
- A. Rostid, Roikhan, 1995, *Pengganti Ahli Waris dan Wasiat Wajibah Dalam Mimbar Hukum*, Ditbinbapera Islam, Jakarta, Nomor 23 November- Desember 1995
- Azhar Basyir, Ahmad, 1993, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, UII Press, Yogyakarta
- Budiono, Rahmat, 1999, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Budiarto, M, 1987, *Pengangkatan Anak ditinjau dari segi Hukum*, Akademi Presindo, Jakarta
- Depag RI, 2001, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Ditbinbapera Islam, Jakarta
- , 1989, *Alqur'an dan terjemahannya*, Toha Putra, Semarang
- , 2001, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Dirjen Binbaga Islam, Jakarta
- Diroktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Direktorat Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, Jakarta

- Djamil Latif, 1983, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama Di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta
- Djazuli, 2002, *Ushul Fiqh- Metodologi Hukum Islam*, Grafindo Persada, Jakarta
- Daniel S, 1980, *Peradilan Agama Islam Di Indonesia*, Alih Bahasa PT Intermasa, Jakarta
- Efendi, 1990, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Duta Grafika, Semarang
- , 1994, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 5, Cet III, PT. Icthiar Baru Van Hoeven, Jakarta
- Efendi, Satria, 1992, *Analisis Yurisprudensi Tentang Wasiat*, Nomor 7 Dalam Mimbar Hukum, Ditbinbapera, Jakarta,
- Fathurrahman, 1975, *Ilmu Waris*, Al Ma'arif, Bandung
- Fauzan dan Kamil, Ahmad, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta
- Ghazaly, Abdurrahman, 2006, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Habiburrohman, 2005, *Perkara Waris Problematika dan matematikanya*, Nomor 4 April Dalam Suara Uldilag, Pokja Perdat MARI, Jakarta,
- Hadjazuli dan Nurul Aen, 2001, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hasan, Hasniah, 1987, *Hukum Warisan Dalam Hukum Islam*, Surabaya, Bina Ilmu
- Hadi Kusuma, 1986, Hilamn, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Bina Aksara
- , 1992, *Hukum Perkawinan Adat*, Mandat maju, Bandung, 1992
- , 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Hadi, Sutrisno, 1981, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Fak Psikologi UGM, 1981
- Harahap, Yahya, 1990, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara peradilan Agama*, Pustaka Kartini, Jakarta
- Hamid, Zahri, 1977, *Pokok- Pokok Hukum Perkawinan Islam*, Penerbit Iniah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
- Hasbi Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad, 2001, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Rizky Putra, Semarang

- Ibin, Dede, 1998, *Kekuasaan Peradilan agama terhadap Pengesahan Pengangkatan Anak*, Nomor 39 September- Oktober 1998 Dalam Mimbar Hukum, Ditbinbapera, Jakarta
- , 1999, *Pembuktian Keabsahan Anak Angkat*, Nomor 42 Mei- Juni 1999
- Dalam Mimbar Hukum Islam, Ditbinbapera Islam, Jakarta
- , 2004, *Wasiat Wajibah bagi Ahli Waris Non Muslim*, Nomor 4 Februari 2004, Dalam Suara Uldilag, Pokja Perdata MARI, Jakarta
- , 1979, *Alqur'an Dan Terjemahannya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Alqur'an
- Kallaf, Abdul Wahhab, 1985, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Alih Bahasa, Risalah, Bandung
- Kelib Abdullah, 2005, *Bahan Kuliah Hukum Islam I dan II*, Unissula, Semarang, 2005
- Latif, Djamil, 1983, *Kedudukan Dan Kekuasaan Peradilan Agama Di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta
- Margono, S, 2003, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Maro Sidono, Amir, 1990, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak, dan Masalahnya*, Dahara Press, Jakarta
- , 1984, *Pelaksanaan Kewarisan Islam dalam Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta
- Maruzi, Muslich, 1981, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Mujahidin, Semarang
- Pogar, 2001, *Kedudukan Anak Angkat dalam Anak Angkat dalam Warisan*, Dalam Mimbar Hukum No. 54, Thun 2001, September- Oktober, Ditbinbapera Islam, Jakarta
- Rianto, Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta
- Rofiq, Ahmad, 2002, *Fiqh Mawaris ( Edisi Revisi )*, Raja Grafindo, Jakarta
- , 1995, *Hukum Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- , 1997, *Hukum Islam Di Indonesia ( Edisi Revisi )*, Raja Grafindo Indonesia, Jakarta
- Rosyid, Sulaiman, 1876, *Fiqh Islam ( Cet ke XVII )*, At Tahiriyah, Jakarta
- Rohily, Wahbatur, 1989, *Al Fiqhu Al Islamiyah wa Adillaihi juz VIII*, Darul Fikr, Bairut

- Sabiq Sayid, 1996, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa oleh Mudzakir AS, Al Ma'arif, Bandung
- Salim, Oemar, 2000, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Soekanto, Soejono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soemitro, Rony Hanitidjo, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soimin, Soedaryo, 2000, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sugiri, Asep, 2004, *Wasiat untuk Ahli Waris*, Nomor 65 November- Desember 2004 Dalam Mimbar Islam, Ditbinbapera Islam, Jakarta
- Sukardi, 2004, *Metode Penelitian Pendidikan, Kompetensi, dan Praktiknya*, Bumi Aksara, Jakarta
- Suparmoko, 1991, *Metode Penelitian Praktis*, BPFE, Yogyakarta
- Talib, Sayuti, 1981, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta
- , 1974, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta